

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 5

2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), diperlukan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang baik;
 - b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 - c. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bekasi memuat kebijakan pembangunan yang mengacu pada Pola Dasar dan Propeda menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, DPRD, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bekasi Tahun 2005 - 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 – 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bekasi Tahun 2003-2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 - 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, Strategi Kebijakan, dan Program Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal2

Sistematika Rencana Strategik (Renstra) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II ANALISIS VISI DAN MISI
- BAB III EVALUASI RENSTRA 2002 - 2004
- BAB IV PEMETAAN ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL
- BAB V VISI, MISI
- BAB VI TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
- BAB VII EVALUASI KINERJA
- BAB VIII PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

Isi beserta uraian renstra sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Daerah dapat ditinjau ulang paling cepat 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Agustus 2004

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Drs. H.M. SALEH MANAF

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 15 / KEP / 170 – DPRD / 2004 tanggal 2 Agustus 2004.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 9 Agustus 2004



Drs. HERRY HERRY KOESAERI S., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	12
1.3. Dasar Hukum	13
1.4. Pendekatan dalam Penyusunan Renstra	14
1.5. Alur Pikir Pembuatan Perencanaan Stratejik	15
1.6. Sistematika Pelaporan	16
BAB II ANALISIS VISI DAN MISI	18
2.1. Visi	18
2.1.1. Visi Jawa Barat	18
2.1.2. Visi Kabupaten Bekasi	18
2.1.3. Visi Bupati Kabupaten Bekasi	19
2.1.4. Perumusan Visi	20
2.2. Misi	22
2.2.1. Misi Jawa Barat	22
2.2.2. Misi Kabupaten (Perda 33 Tahun 2001)	22
2.2.3. Misi Bupati	22
2.2.4. Analisis Materi Misi	22
BAB III EVALUASI RENSTRA 2002-2004	26
3.1. Perkembangan Indikator Makro	26
3.2. Perkembangan Berdasarkan Kinerja Program	27
3.3. Pengelompokkan dan Perlakuan Program	28
3.4. Review Indikator	33

BAB IV	PEMETAAN ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL	34
4.1.	Kekuatan	34
4.2.	Kelemahan	34
4.3.	Peluang	35
4.4.	Ancaman	35
4.5.	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) ..	35
BAB V	VISI MISI	40
5.1.	Pernyataan Visi	40
5.2.	Pernyataan Misi	41
BAB VI	TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM	49
6.1.	Kewenangan Pemerintahan	51
6.2.	Isu Pokok Pembangunan	51
A.	Perkembangan program Renstra 2002	51
B.	Perkembangan wilayah	51
6.3.	Tujuan dan Sasaran	54
6.4.	Strategi kebijakan dan program berdasarkan bidang Pemerintahan	57
6.4.1.	Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	57
A.	Umum	57
B.	Permasalahan	59
C.	Matriks Bidang Administrasi Umum Pemerintahan ...	59
6.4.2.	Bidang Pertanian	61
A.	Umum	61
B.	Permasalahan	61
C.	Matriks Bidang Pertanian	62
6.4.3.	Bidang Perikanan dan Kelautan	62
A.	Umum	62
B.	Permasalahan	62
C.	Matriks Bidang Perikanan dan Kelautan	63
6.4.4.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	63
A.	Umum	63
B.	Permasalahan	64
C.	Matriks Bidang Perindustrian dan Perdagangan	64

6.4.5. Bidang Tenaga Kerja	65
A. Umum	65
B. Permasalahan	65
C. Matriks Bidang Tenaga Kerja	65
6.4.6. Bidang Kesehatan	66
A. Umum	66
B. Permasalahan	66
C. Matriks Bidang Kesehatan	67
6.4.7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	67
A. Umum	67
B. Permasalahan	68
C. Matriks Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	68
6.4.8. Bidang Sosial	68
A. Umum	68
B. Permasalahan	69
C. Matriks Bidang Sosial	69
6.4.9. Bidang Penataan Ruang	69
A. Umum	69
B. Permasalahan	71
C. Matriks Bidang Penataan Ruang	71
6.4.10. Bidang Pemukiman	71
A. Umum	71
B. Permasalahan	71
C. Matriks Bidang Pemukiman	72
6.4.11. Bidang Pekerjaan Umum	72
A. Umum	72
B. Permasalahan	73
C. Matriks Bidang Pekerjaan Umum	73
6.4.12. Bidang Perhubungan	74
A. Umum	74
B. Permasalahan	74
C. Matriks Bidang Perhubungan	74
6.4.13. Bidang Lingkungan Hidup	74
A. Umum	74
B. Permasalahan	75
C. Matriks Bidang Lingkungan Hidup	75

6.4.14. Bidang Kependudukan	76
A. Umum	76
B. Permasalahan	76
C. Matriks Bidang Kependudukan	76
6.4.15. Bidang Kepariwisataaan	77
A. Umum	77
B. Permasalahan	77
C. Matriks Bidang Kepariwisataaan	77
6.5. Indikator sasaran strategis	93
6.5.1. Indeks Pembangunan Manusia	93
6.5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	94
6.5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi UMKM	94
6.5.4. PDRB Perkapita	95
6.5.5. Pertumbuhan PAD	95
6.5.6. Infrastruktur	95
6.5.7. Kualitas lingkungan	96
6.5.8. Jumlah orang miskin	97
6.5.9. Prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Ekonomi	97
6.5.10. Jumlah pengangguran terbuka	98
BAB VII EVALUASI KINERJA	101
7.1. Umum	101
7.2. Indikator dan standar kinerja	101
7.3. Kerangka pengukuran kinerja	103
7.4. Pengukuran pencapaian sasaran	103
7.5. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja	103
BAB VIII PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Unsur-Unsur yang terkandung dalam Visi Perda 33 Tahun 2001, Visi Bupati dan Visi Jawa Barat.....	20
Tabel 2-2	Unsur-Unsur yang terkandung dalam Misi Perda 33 Tahun 2001, Misi Bupati dan Misi Jawa Barat	25
Tabel 3-1	Pencapaian Beberapa Indikator Renstra pada Tahun 2002	26
Tabel 3-2	Rangkuman Capaian Kinerja Program dan Proyek Kabupaten Bekasi	27
Tabel 3-3	Pengelompokkan Program-program berdasarkan Pencapaian Visi Misi dan Skim Perlakuannya	28
Tabel 3-4	Program-program Termasuk Berkembang dengan Skenario Pengembangan dengan Business as Usual.....	30
Tabel 3-5	Program-program Termasuk Berpotensi Tertinggal dengan Skenario Pengembangan dengan Penguatan	31
Tabel 3-6	Program-program Termasuk Berpotensi Tertinggal dengan Skenario Pengembangan dengan Penguatan	32
Tabel 3-7	Program-program Termasuk Tertinggal dengan Skenario Pengembangan dengan Akselerasi	32
Tabel 6-1	Perkembangan Program pada Tahun 2002 dan Perlakuannya	51
Tabel 6-2	Klasifikasi Kecamatan di Kabupeten Bekasi menurut Klasifikasi Klassen pada Tahun 2002	53
Tabel 6-3	Matriks Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	59
Tabel 6-4	Matriks Bidang Pertanian	62
Tabel 6-5	Matriks Bidang Perikanan dan Kelautan	63
Tabel 6-6	Matriks Bidang Perindustrian dan Perdagangan	64
Tabel 6-7	Matriks Bidang Tenaga Kerja	65
Tabel 6-8	Matriks Bidang Kesehatan	67
Tabel 6-9	Matriks Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	68
Tabel 6-10	Matriks Bidang Sosial	69
Tabel 6-11	Matriks Bidang Penataan Ruang	71
Tabel 6-12	Matriks Bidang Permukiman	72
Tabel 6-13	Matriks Bidang Pekerjaan Umum	73
Tabel 6-14	Matriks Bidang Perhubungan	74

Tabel 6-15	Matriks Bidang Lingkungan Hidup	75
Tabel 6-16	Matriks Bidang Kependudukan	76
Tabel 6-17	Matriks Bidang Pariwisata	77
Tabel 6-18	Matriks Rencana Strategis dalam dimensi Bidang Pemerintahan	78
Tabel 6-19	Indikator Pencapaian Sasaran Strategis	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Partisipatif Penyusunan Renstra	14
Gambar 1.2	Bagan Alir Kerangka Penyusunan Renstra 2005-2009 ...	15
Gambar 6.1	Penyebaran Wilayah Tertinggal Pada Tahun 1998	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap ada pergantian kepemimpinan pemerintah, maka akan terjadi estafeta kepada pemimpin baru. Substansi pokok dalam estafeta kepemimpinan adalah adanya amanat masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi. Salah satu amanah masyarakat adalah seperti telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi. Visi tersebut adalah bukan Visi Pemerintah Kabupaten Bekasi, melainkan visi masyarakat Kabupaten Bekasi yang dijamin dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu didesain berdimensi waktu cukup lama, sehingga dengan sengaja dipisahkan dengan Rencana Strategisnya, karena Renstra dalam periode yang lebih pendek dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan jaman. Karena visi dirumuskan oleh seluruh komponen masyarakat maka perwujudan pembangunan Kabupaten Bekasi menuntut semua pemangku pembangunan daerah (stakeholder) untuk bersama-sama mewujudkan visinya.

Dengan adanya estafeta kepemimpinan pada periode 2004-2009, maka visi Kabupaten diharapkan tetap, namun Rencana strateginya dapat saja ditinjau ulang, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Disamping itu Rencana Strategis Kabupaten untuk periode 2002-2004 hampir berakhir, sehingga memerlukan Renstra baru untuk periode 2005-2009.

Pada sisi lain, setiap Bupati yang baru menjabat telah memiliki komitmen politik yang dirumuskan dalam visi kepemimpinan atau Rencana Strategis Kandidat, setelah satu bulan Bupati dilantik, maka komitmen politik sesuai dengan peraturan pemerintah (PP 108 Tahun 2000) Bupati harus menyusun Renstra untuk dijadikan Peraturan Daerah dan menjadi dasar pertanggung jawaban kepada publik.

Sehubungan dengan berakhirnya Renstra 2002-2004, maka untuk mengimplementasikan komitmen politik Bupati diperlukan Rencana Strategi baru. Renstra ini selanjutnya akan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi dasar dalam operasionalisasi program serta dasar evaluasi kinerja pembangunannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir masa jabatan Bupati kepada publik.

Rencana strategis merupakan keputusan yang bersifat sistematis dan berfungsi panduan bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan seperti dirumuskan dan dituangkan dalam dokumen visi dan misi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 33 Tahun 2001. Disamping itu, Renstra yang disusun harus mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku, diantaranya Rencana Strategis Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis Instansi Pemerintah merupakan keterpaduan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain-agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen daerah.

Perumusan Rencana Strategi Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dengan demikian rencana strategis Kabupaten Bekasi dapat lebih berkualitas dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 adalah :

- 1) Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi 2005 -2009.
- 2) Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik selama satu tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan.
- 3) Menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan antara rencana pemerintah daerah dengan harapan masyarakat.
- 4) Memberikan penjelasan tentang gambaran masa depan yang ingin diwujudkan berdasarkan nilai - nilai yang dianut dan cara untuk mencapainya dalam dinamika lingkungan strategis.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan strategis merupakan diagnosa terhadap pencapaian hasil secara obyektif melalui kapabilitas sumber daya yang dapat difokuskan secara optimal sesuai dengan pencapaian hasil yang diinginkan dan dapat memberikan arah orientasi yang jelas dalam rumusan dan kebijakan sehingga diagnosa penilaian tersebut mendapatkan feedback yang akurat untuk pengembangan dimasa mendatang.

- 2) Sebagai alat pemacu di dalam pelaksanaan pembangunan mengingat perencanaan strategis berorientasi pada masa depan.

1.3. Dasar Hukum

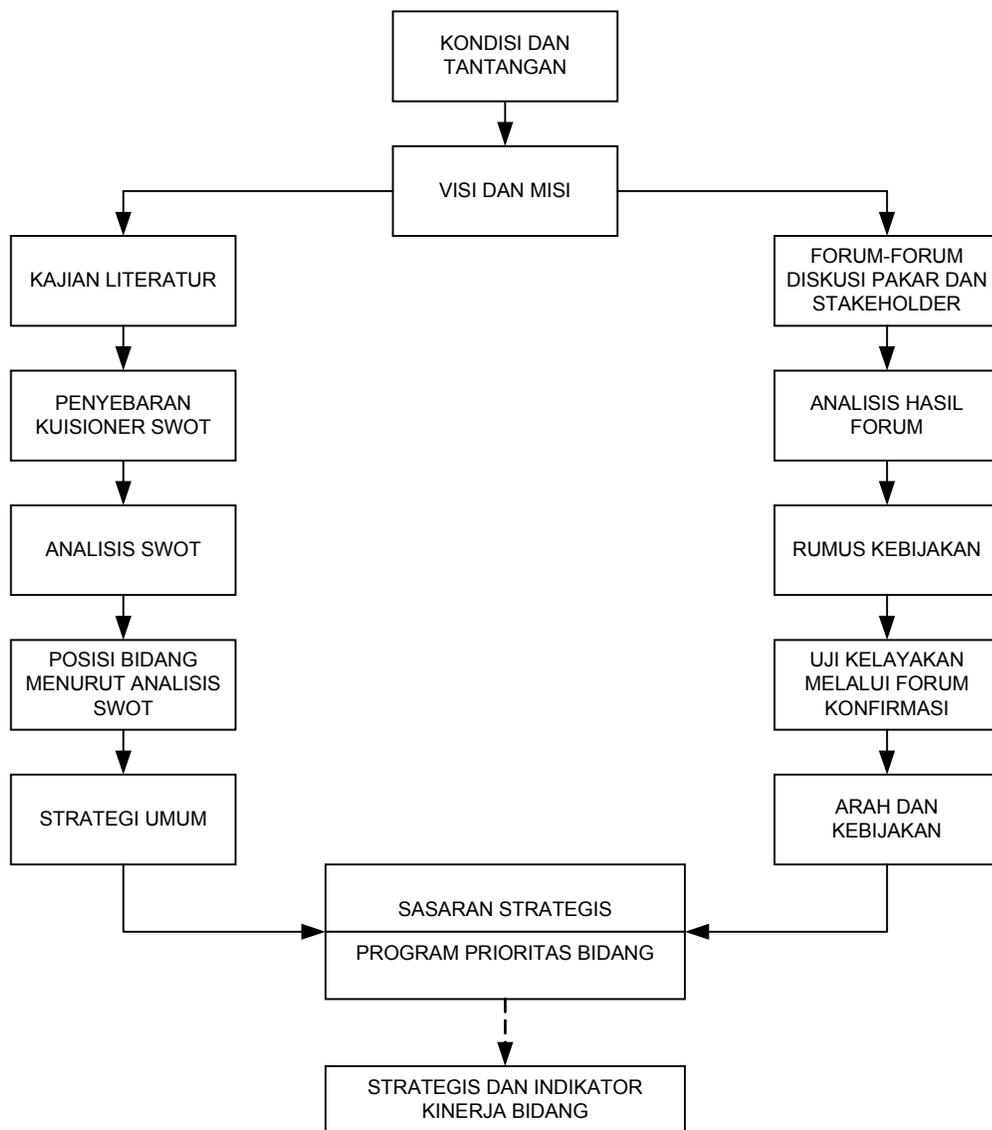
Renstra Kabupaten Bekasi disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idil, yaitu Pancasila;
- b. Landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Landasan Operasional, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
 - 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.
 - 8) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat 2001-2005.
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi.
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Renstra Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2004.
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013.
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi.
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004.
 - 14) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

1.4. Pendekatan dalam penyusunan Renstra

Penyusunan Dokumen Renstra yang melibatkan stakeholder : DPRD, masyarakat, pemerintah, pengusaha dan LSM sangat bersifat partisipatif dan dinilai sangat efektif dalam rangka menjamin komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten terhadap kesepakatan program dan kegiatan pembangunan daerah.

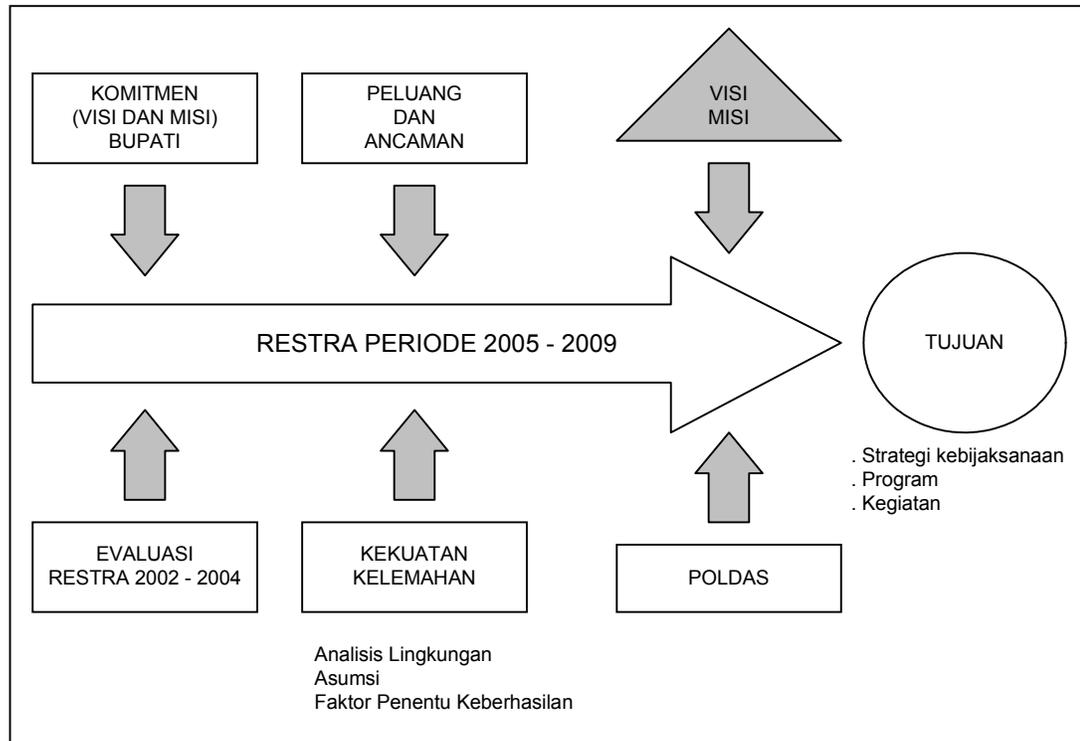
Oleh karena itu maka setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang ada dalam Renstra. Mengenai proses partisipatif dalam penyusunan Renstra dapat dilihat dalam gambar 1-1. sebagai berikut :



Gambar 1-1. Proses Partisipatif Penyusunan Renstra

1.5. Alur Pikir Pembuatan Perencanaan Strategik

Penyusunan Rencana Strategis 2005-2009 merupakan penyusunan teknik dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dengan mempertimbangkan dan mensinergikan berbagai aspek sebagai berikut : dokumen visi misi Kabupaten Bekasi, Komitmen Bupati dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi, Poldas, aspek internal dan eksternal, hasil pencapaian Renstra 2002-2004, Keterkaitan berbagai aspek tersebut dapat disajikan dalam Gambar 1-2 di bawah ini.



Gambar 1 – 2. Bagan Alir Kerangka Penyusunan Restra 2005 - 2009

Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan Perencanaan Strategik sebagai dasar penyusunan Renstra adalah :

1. Kondusif dan Partisipatif

Wujud dalam perencanaan Strategik kiranya dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi dan dapat mengakomodir perbedaan kepentingan dan nilai serta dapat mendorong dalam proses pengambilan keputusan yang teratur sehingga pencapaian tujuan organisasi akan berhasil.

2. Proaktif, bukan reaktif
Mencermati terhadap perubahan dalam lingkungan yang sangat kompleks maka dalam penyusunan perencanaan berdasarkan atas perubahan yang dilakukan secara proaktif dan bukan reaktif.
3. Adaptif dan akomodatif
Perencanaan strategik yang dibuat harus dapat dan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang timbul sehingga dimungkinkan dapat memanfaatkan peluang yang ada.
4. Berorientasi output, bukan input
Guna tercapai keberhasilan dalam pengelolaan maka keberadaan perencanaan strategik dapat mendiagnosa organisasi pada capaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
5. Visioner
Melihat pada keadaan atau orientasi pada masa yang akan datang.
6. Berorientasi pelayanan prima
Faktor penentu keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan tingkat kepuasan pelanggan.

1.6. Sistematika Laporan

Dokumen Renstra 2005-2009 Kabupaten Bekasi disajikan dalam sistematika pelaporan sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Pendekatan dalam Penyusunan Renstra
- 1.5 Alur Pikir Pembuatan Perencanaan Strategis
- 1.6 Sistematika Laporan

II ANALISIS VISI MISI

- 2.1 Visi
 - 2.1.1 Visi Jawa Barat
 - 2.1.2 Visi Kabupaten Bekasi
 - 2.1.3 Visi Bupati Kabupaten Bekasi
 - 2.1.4 Perumusan Visi

- 2.2 Misi
- 2.2.1 Misi Jawa Barat
- 2.2.2 Misi Kabupaten Bekasi
- 2.2.3 Misi Bupati Kabupaten Bekasi
- 2.2.4 Analisis Materi Misi

III EVALUASI PENCAPAIAN VISI MISI

- 3.1 Perkembangan Makro
- 3.2 Perkembangan Berdasarkan Kinerja Program
- 3.3 Pengelompokkan dan Perlakuan Program
- 3.4 Review Indikator

IV PEMETAAN ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL

- 4.1 Kekuatan
- 4.2 Kelemahan
- 4.3 Peluang
- 4.4 Ancaman
- 4.5 Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Tantangan

V VISI MISI

- 5.1 Pernyataan Visi
- 5.2 Pernyataan Misi

VI TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

- 6.1 Kewenangan Pemerintah
- 6.2 Isu Pokok Pembangunan
- 6.3 Tujuan dan Sasaran
- 6.4 Strategi Kebijakan dan Program berdasarkan Bidang Pemerintahan
- 6.5 Indikator Sasaran Strategis

VII EVALUASI KINERJA

- 7.1 Umum
- 7.2 Indikator dan Standar Kinerja
- 7.3 Kerangka Pengukuran Kinerja
- 7.4 Evaluasi Kinerja
- 7.5 Analisis Pencapaian Akuntabilitas kinerja

VIII PENUTUP

BAB II

ANALISIS VISI DAN MISI

2.1. Visi

Analisis ini ditujukan untuk melihat keterkaitan atau kesamaan unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi dan Komitmen Bupati dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi. Uraian masing-masing visi adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi Jawa Barat

Visi Jawa Barat secara yuridis mengikat secara hukum bagi pemerintah Propinsi Jawa Barat, dan masyarakat Jawa Barat. Visi Jawa Barat dirumuskan dalam pernyataan sebagai berikut:

" Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra terdepan Ibukota Negara Tahun 2010."

Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- Masyarakat Jawa Barat sebagai subjek yang jelas sebagai pelaku pembangunan;
- Dimensi yang ingin diwujudkan adalah berkeimanan dan taqwa sebagai dasar dalam pembangunan akhlak;
- Aktivitas kehidupan terutama ekonomi memiliki kekuatan daya saing yang terkuat di Indonesia dan memiliki keterkaitan (linkage) dengan pusat pertumbuhan nasional (ibukota negara).

2.1.2. Visi Kabupaten Bekasi

Visi Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 33 Tahun 2001 mengikat secara Hukum, untuk itu perlu diimplementasikan dengan mengacu pada keadaan riil. Visi tersebut dinyatakan sebagai berikut:

" Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agribisnis dan Industri Berkelanjutan. "

Visi tersebut mengakomodasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai subjek utama, disertai dengan dimensi yang komprehensif (spiritual, emosional, fisik, intelektual) dan alamat pembangunan yang jelas.
- b. Keseimbangan struktural, antara sektor primer dan sekunder, kekuatan ekonomi pada daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UKM.
- c. Agribisnis, industri kecil dan industri besar secara sinergis menjadi sektor ekonomi basis, artinya kedua sektor menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan ekonomi.
- d. Keberlanjutan sebagai arah perubahan atau arah pembangunan yang akan dituju, arah tersebut meliputi :
 - 1) Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya.
 - 2) Pembangunan yang berkeadilan antar kelompok masyarakat, antar waktu (generasi sekarang dan generasi akan datang) dan antar wilayah (wilayah kota dan desa).
 - 3) Pemberdayaan masyarakat (empowering), terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat paling miskin (poorest of the poof), yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita.
 - 4) Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan

2.1.3. Visi Bupati Kabupaten Bekasi

Visi Bupati merupakan komitmen yang dibangun sejak pencalonan menjadi Bupati Kabupaten Bekasi, komitmen tersebut seyogyanya dipertanggungjawabkan kepada publik. Visi yang menjadi komitmennya adalah :

" Terwujudnya Keunggulan Wilayah Industri bagi Perikehidupan dan Peradaban Masyarakat. "

Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah:

- a. Bekasi direncanakan menjadi wilayah industri yang kompetitif tidak saja di wilayah nasional namun internasional
- b. Dengan adanya industrialisasi diharapkan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan material dan spiritual.

2.1.4. Perumusan Visi

Unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Jawa Barat, terutama dalam variabel iman dan taqwa serta sektor ekonomi yang memiliki kekuatan bersaing dengan sendirinya akan terpenuhi dengan Visi Kabupaten. Begitu juga unsur Visi Bupati, terutama variabel pengembangan industri dan kesejahteraan masyarakat dengan sepenuhnya akan terpenuhi dengan mengimplementasikan Visi Kabupaten.

Visi Jawa Barat mengikat secara hukum Pemerintah Propinsi untuk mewujudkannya, sedangkan Visi Kabupaten Bekasi melalui Perda Nomor 33 Tahun 2001 juga mengikat Pemerintah Kabupaten secara hukum. Sedangkan Visi Bupati merupakan komitmen pemimpin yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Untuk itu ketiga visi harus sejalan dan saling mengisi, bukan untuk saling meniadakan. Kesamaan unsur-unsur ketiga visi tersebut disajikan dalam Tabel 2-1 di bawah ini.

Tabel 2-1. Unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Perda 33 Tahun 2001, Visi Bupati dan Visi Jawa Barat

Unsur	Jabar	Perda 33	Bupati
Pertama (Subyek pembangunan)	Manusia Iman dan taqwa	Manusia unggul yang agamis	Perikehidupan dan peradaban masyarakat
Kedua (domain atau arah pembangunan)	Termaju di Indonesia dan Mitra terdepan Ibukota	Berbasis agribisnis dan industri berkelanjutan	Terwujudnya keunggulan wilayah industri

Unsur pertama dari visi adalah menjelaskan Subjek pembangunan, memiliki kesamaan arti subjek pembangunan adalah manusia yang beriman dan bertaqwa sehingga mewujudkan perilaku yang dipesankan oleh agama, perilaku tersebut akan berdampak pada perikehidupan dan peradaban.

Unsur kedua adalah menyangkut aktivitas pembangunan, umumnya menyangkut pembangunan ekonomi. Unsur kedua terdapat perbedaan redaksi dan cakupan substansi (luas dan sempit), namun memiliki implikasi yang sama, yakni untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang kompetitif.

- 1) **Visi Jawa Barat** : aktivitas pembangunan diindikasikan dengan istilah termaju, artinya memiliki keunggulan dari wilayah lainnya, sedangkan mitra terdepan artinya memiliki regional linkage dengan pusat pertumbuhan nasional, yakni Jakarta. Dengan demikian sektor-sektor memiliki kekuatan daya saing dan senantiasa terkait dengan pertumbuhan pasar.
- 2) **Visi Kabupaten Bekasi** : memiliki unsur basis agribisnis dan industri berkelanjutan, hal ini mengandung prinsip-prinsip :
 - Keseimbangan struktur ekonomi
 - Istilah basis mengacu pada istilah ekonomi basis, artinya agribisnis dan industri kecil menjadi sektor utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat Bekasi.
 - Keunggulan ekonomi diwujudkan dalam keunggulan bersaing yang diwujudkan dengan produk berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.
 - Berkelanjutan mengindikasikan adanya keseimbangan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan
- 3) **Visi Bupati** : Terwujudnya keunggulan wilayah industri, menunjukkan adanya unsur bahwa sektor utama pembangunan ekonomi adalah industri sebagai prime mover perekonomian wilayah Bekasi,

Dengan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa dengan mengimplementasikan Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, maka baik secara materil maupun yuridis akan terpenuhinya visi Jawa Barat serta dapat terakomidasikannya komitmen Bupati (visi misi) untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Jadi secara material ketiga visi tersebut tidak meniadakan satu sama lainnya, namun Visi Kabupaten justru sejalan dan dapat memenuhi visi Jawa Barat dan dapat menjadi dasar pertanggung-jawaban kepada publik dari visi Bupati yang telah disampaikan. Dengan demikian Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kabupaten secara sah masih relevan dan layak untuk diimplementasikan.

2.2. Misi

2.2.1. Misi Jawa Barat

Perwujudan Visi Jawa Barat dilakukan melalui Misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM manusia Jawa Barat;
- 2) Pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh;
- 3) Pemantapan kinerja pemerintah daerah;
- 4) Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan;
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

2.2.2. Misi Kabupaten (Perda 33 Tahun 2001)

- 1) Meningkatkan kualitas Manusia yang sehat, pintar dan bener
- 2) Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
- 3) Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis
- 4) Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
- 5) Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban
- 6) Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu
- 7) Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.

2.2.3. Misi Bupati

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan "Good Governance"
- 2) Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi
- 3) Optimalisasi tata ruang
- 4) Pemantapan keamanan dan ketertiban berdemokrasi
- 5) Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
- 6) Pendidikan berbasis kompetensi dan pembinaan akhlak bersendikan agama
- 7) Sikap hidup masyarakat disiplin, bersih, sehat, tertib, dan rukun.

2.2.4. Analisis Materi Misi

Analisis misi ini ditujukan untuk melihat kesamaan unsur yang terkandung di dalamnya serta tujuan sasaran yang ingin dicapainya. Unsur-unsur tersebut selengkapnya disajikan dalam Tabel 2-1. yang uraiannya adalah sebagai berikut :

Misi pertama dari Kabupaten Bekasi tentang **Meningkatkan kualitas Manusia yang sehat, pintar dan bener** adalah sejalan dengan misi Bupati dan Propinsi Jawa Barat. Misi Bupati yang dinyatakan dalam pernyataan misinya sebagai berikut : **Pendidikan berbasis kompetensi dan pembinaan akhlak bersendikan agama**. Sedangkan misi Jawa Barat dinyatakan dalam misinya sebagai berikut : **Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM manusia Jawa Barat**. Berdasarkan pernyataan ketiga misi tersebut, maka dapat dilihat memiliki kesamaan unsur, yakni pembangunan manusia yang berdimensi lahir dan batin. Begitu juga misi ini diperankan oleh sektor yang sama yakni sektor pendidikan, kesehatan dan pendidikan agama.

Misi kedua dari Kabupaten Bekasi adalah **Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat**. Sedangkan Misi Bupati adalah: **Penyelenggaraan pemerintahan "Good Governance"**, dan misi Jawa Barat **Pemantapan kinerja pemerintah daerah**. Dengan demikian dapat dilihat bahwa misi Bupati dan Jawa Barat sudah dicakup oleh Misi Kabupaten Bekasi (Perda 33 Tahun 2001).

Misi ketiga. Misi ketiga dari Perda 33 Tahun 2001 adalah **Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis**. Sedangkan misi Bupati dinyatakan dalam pernyataan misi sebagai berikut : **Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat**. Sedangkan misi Jawa Barat diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut : **Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah**. Hal ini menunjukkan bahwa misi ketiga Perda 33 Tahun 2001 masih sejalan baik dengan misi Bupati maupun Jawa Barat.

Misi Keempat. Perda 33 Tahun 2001 menyatakan sebagai berikut : **Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan**. Misi ini ditujukan untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan (pemerataan dan kesamaan kesempatan), karena adanya perbedaan kemampuan dan kecepatan tersebut, maka UKM perlu mendapat penguatan dari unsur eksternal. Misi Bupati diungkapkan dalam pernyataan sebagai berikut : **Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi**. Kedua misi sejalan ke arah tujuan pemerataan pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari membangun keadilan distributif (distributive justice}. Sedangkan misi Jawa barat diungkapkan dalam **bahasa perekonomian yang tangguh**. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa misi keempat dari Perda 33 tahun 2001 masih relevan dengan misi Bupati dan Jawa Barat.

Misi kelima. Misi kelima dari Perda Nomor 33 tahun 2001 diungkapkan dalam pernyataan : **Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban.** Sedangkan misi Bupati diungkapkan dalam dua pernyataan misi, yakni a) Pemantapan keamanan dan ketertiban berdemokrasi, b) Sikap hidup masyarakat disiplin, bersih, sehat, tertib, dan rukun. Misi perda 33 tahun 2001 merupakan dasar untuk melahirkan kemantapan keamanan dan sikap disiplin. Jadi misi perda 33 tahun 2001 mengungkapkan sumbernya sedangkan misi Bupati merupakan output atau outcomenya dari supremasi hukum. Dengan demikian kedua misi ini sejalan.

Misi keenam. Misi keenam dari Perda Nomor 33 Tahun 2001 dinyatakan sebagai berikut : **Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu.** Misi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar yang efisien serta untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi produk wilayah Kabupaten Bekasi. Misi ini tidak terdapat pada misi lainnya.

Misi Ketujuh. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan. Misi ini sejalan dengan misi Bupati, melalui pernyataan misinya yaitu Optimalisasi tata ruang.

Berdasarkan analisis misi di atas maka misi yang dituangkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2001 dapat mengakomodasikan atau dapat menampung seluruh misi Jawa Barat dan Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa dengan mengimplementasikan Perda Nomor 33 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi, maka baik secara materil maupun yuridis akan terpenuhinya misi Jawa Barat serta dapat terakomodasikannya komitmen Bupati (misi) untuk dipertanggung-jawabkan kepada publik. *Dengan demikian Perda Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kabupaten secara sah (valid) masih relevan dan layak untuk diimplementasikan.*

Tabel 2-2. Unsur-Unsur yang terkandung dalam Misi Perda 33 Tahun 2001,
Misi Bupati dan Misi Jawa Barat

Perda 33 Tahun 2001	Komitmen Bupati	Misi Jawa Barat
Meningkatkan kualitas Manusia yang sehat, pinter dan bener.	Pendidikan berbasis kompetensi dan pembinaan akhlak bersendikan agama.	Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM manusia Jawa Barat.
Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.	Penyelenggaraan pemerintahan "Good Governance".	Pemantapan kinerja pemerintah daerah.
Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis.	Transformasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.	Peningkatan kualitas kehidupan so yang berlandaskan agama dan budaya daerah
Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.	Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.	Pengembangan struktur perekonomian daerah yang tangguh.
Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keamanan dan ketertiban berdemokrasi. • Sikap hidup masyarakat disiplin, bersih, sehat, tertib dan rukun. 	
Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu.		Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan.
Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.	Optimalisasi tata ruang.	

BAB III

EVALUASI RENSTRA 2002-2004

3.1. Perkembangan Indikator Makro

Visi dan Misi Kabupaten Bekasi telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 sedangkan Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2004 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 34 Tahun 2001. Hubungan Visi dan Misi beserta indikatornya dapat dilihat dalam matrik interaksi yang disajikan dalam Tabel 3-2.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi (2003) telah melakukan evaluasi pencapaian Visi Misi Kabupaten Bekasi. Evaluasi dilakukan pada sejumlah indikator tertentu. Hasil evaluasi disajikan Tabel 3-1, sebagai berikut :

Tabel 3-1. Pencapaian Beberapa Indikator Renstra pada Tahun 2002

No	Indikator	Target 2002	Realisasi 2002	Pencapaian
1	Angka Kematian Bayi	55.00	51.83	106.81%
2	Angka Harapan Hidup	68.00	67.00	98.53%
3	Angka Melek Huruf	88.50	91.1	102.94%
4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.15	7.4	103.49%
	Indek Pembangunan Manusia	70.80	70.73	99.90%
5	Angka Partisipasi Murni SD	94.22	95.96	101.84%
6	Angka Partisipasi Murni SLTP	84.03	69.13	82.26%
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4.20	4.06	96.66%
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.76	4.95	131.64%
9	Laju Pertumbuhan Sektor pertanian	1.36	0.25	18.38%
10	Kontribusi Sektor tersier (%)	21.09	15.28	72.45%
11	PDRB per Kapita	10.917.663	20.144.206	184.51%
12	Rasio Gini	0.29	0.28	96.55%
13	Pengangguran Terbuka	4.56	6.35	139.25%
14	TPAK	70.00	51.82	74.02%
15	Jumlah Penduduk Miskin (000)	187.9	150.8	124.60%

Sumber: Bappeda, 2003 (diolah kemudian)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Mencapai target yang telah ditetapkan, artinya pencapaian indikator 95 % -100 %, artinya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut adalah Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka rata - rata lama sekolah, Indek Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Murni SD dan Rasio Gini.

- b. Di bawah target yang telah ditetapkan, artinya pencapaian indikator di bawah 95 %. Sektor-sektor tersebut adalah Angka Partisipasi Murni SLIP, Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kontribusi Sektor tersier.
- c. Indikator di atas target yang telah ditetapkan, artinya pencapaian misi di atas kuantitas indikator yang telah ditetapkan, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pengangguran terbuka, TPAk dan Jumlah orang miskin.

Berdasarkan penggolongan indikator di atas dapat dilihat bahwa visi manusia unggul telah diukur melalui pendekatan indikator fisik, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perkembangannya sesuai dengan harapan, artinya arah perkembangannya sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga partisipasi anak usia sekolah SD sesuai dengan yang direncanakan.

Rasio Gini adalah ukuran pemerataan pembangunan antar kelompok masyarakat menunjukkan arah dan perkembangan yang diharapkan, namun perkembangan tersebut akan semakin gradual dan sulit mencapai angka mendekati angka 0. Indikafor tersebut memberikan informasi menyangkut equity atau aspek keadilan distributif sekaligus sebagai indikator sustainability dari pembangunan.

Sektor pertanian, kontribusi sektor tersier dan partisipasi Murni SLTP masih jauh dari harapan. Sektor pertanian memiliki natur perkembangan yang sangat berbeda dengan sektor lainnya, karena sangat tergantung dengan faktor alam yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan, terutama bencana alam. Sehingga angka pertumbuhannya sering fluktuatif. Dan perkembangan sektoral dapat dilihat dengan baik dalam jangka menengah (3-5 tahun).

Kontribusi sektor tersier menggambarkan perkembangan struktur ekonomi regional. Perkembangan yang diharapkan terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Proporsi PDRB dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian semakin menurun dalam jangka panjang. Perkembangan ini bukan berarti menurunnya output sektor pertanian, namun proporsinya terhadap keseluruhan output cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi dari basis sektor primer ke sektor sekunder dan tersier sebagai upaya peningkatan nilai tambah;
- b. Proporsi PDRB dan penyerapan tenaga kerja pada sektor sekunder semakin meningkat dalam jangka panjang;
- c. Proporsi PDRB dan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersier (jasa) semakin meningkat dalam jangka panjang.

Berdasarkan perkembangan di atas, maka kontribusi sektor tersier berupa proporsi terhadap total output dalam jangka panjang harus semakin besar dan sebaliknya sektor pertanian semakin menurun. Perkembangan di atas harus sejalan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerjanya. Untuk itu tugas transformasi sosial ekonomi harus tetap konsisten dalam pembangunan ekonomi regional.

Indikator APM SLTP sebagai informasi tentang perkembangan wajib belajar 9 Tahun. Indikator ini dalam jangka menengah harus semakin besar, karena erat kaitannya dengan mutu kehidupan.

3.2. Perkembangan Berdasarkan Kinerja Program

Berdasarkan evaluasi Bappeda (2003) pencapaian kinerja strategi, program dan proyek/kegiatan terbagi atas pencapaian di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3-2. Rangkuman Capaian Kinerja Program dan Proyek Kabupaten Bekasi

Item	Strategi	Program	Proyek
Rata-rata Catalan Kinerja	96.17 %	96.73 %	96.70 %
Kinerja di atas Rata-rata	12	33	
Kinerja di bawah rata-rata	2	8	
Total	14	41	441

Sumber: Bappeda, 2003.

Strategi yang berada di bawah rata-rata adalah :

- a. Strategi 1 misi 2 : Meningkatkan peran dan fungsi Pemkab, DPRD dan lembaga masyarakat;
- b. Strategi 1 misi 7 : Mengoptimalkan penataan ruang wilayah.

Sedangkan program yang berada di bawah rata-rata adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas keluarga;
- 2) Peningkatan kualitas Ketenagakerjaan;
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana pengairan;
- 5) Perencanaan Tata ruang;
- 6) Pengembangan jaringan dan sistem Informasi;
- 7) Pembinaan, penerapan dan penegakan hukum;
- 8) Program rehabilitasi lahan dan sumberdaya alam.

3.3. Pengelompokan dan Perlakuan Program

Berdasarkan Pencapaian program dan pencapaian indikator maka program-program dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori didasarkan atas matrik perkembangan indikator dan perkembangan program. Hasil matrik dapat dilihat dalam label di bawah ini.

Tabel 3-3. Pengelompokan Program-program berdasarkan Pencapaian Visi Misi dan Skim Perlakuannya

Pencapaian Program Pencapaian indikator	Di atas Rata-rata (> R)	Di bawah Rata-rata (< R)
> 95 %	Normal (business as usual)	Potensi Tertinggal (penguatan)
< 95 %	Potensi maju (penguatan)	Tertinggal (akselerasi)

Matrik ini terbagi atas pencapaian mencapai target > 95 % dan di bawah target (< 95%). Sedangkan variabel kinerja program terbagi atas di atas rata-rata (> R) dan di bawah rata-rata (< R). Berdasarkan matrik tersebut program-program dikelompokkan menjadi,

- Berkembang normal sehingga mengalami kemajuan, perlakuan kelompok program ini adalah business as usual, yakni mempertahankan kinerja seperti tahun sebelumnya,
- Berkembang dan berpotensi tertinggal, perlakuan kelompok program ini adalah penguatan (strengthen) baik melalui pendanaan maupun manajemen program sehingga mengalami peningkatan efektifitas program,
- Berkembang ke arah berpotensi untuk mengalami kemajuan, perlakuan kelompok program ini adalah hampir sama dengan butir b,
- Perkembangannya tertinggal. Perlakuan kelompok program ini adalah melalui percepatan atau akselerasi. Perlakuan akselerasi dapat dilakukan melalui perlakuan khusus baik pendanaan maupun pelaksanaannya, kalau perlu bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program.

Tabel 3-4. Program-program termasuk berkembang dengan skenario pengembangan dengan business as usual

Misi	Strategi	Program	Status Program
Misi 1	1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia di segala bidang	1. Peningkatan derajat kesehatan	Maju
		2. Pembinaan dan pengembangan pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan	Maju
Misi 2	1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemkab, DPRD dan lembaga masyarakat	1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pelayanan umum dan masyarakat	Maju
		2. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah Kab. Anggota DPRD dan masyarakat	Maju
		3. Pengembangan kelembagaan masyarakat	Maju
	2. Meningkatkan kemampuan perangkat dan keuangan daerah	1. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah	Maju
		2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah	Maju
	3. Mengembangkan peran masyarakat dalam pembangunan	3. Pembangunan wilayah	Maju
Misi 3	1. Mengembangkan kerukunan dalam kehidupan bernegara, beragama dan berbangsa	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berdasarkan masyarakat Bekasi yang luhur dan agamis	Maju
Misi 4	1. Memberdayakan Ekonomi rakyat	Penguasaan informasi	Maju
Misi 5	1. Penegakkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih	Peningkatan pengawasan	Maju
Misi 6	1. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana layanan dasar masyarakat	Pembangunan dan peningkatan sarana pemukiman	Maju

Tabel 3-5. Program-program termasuk berpotensi Tertinggal dengan skenario pengembangan dengan penguatan

Misi	Strategi	Program	Status Program
Misi 1	1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia disegala bidang	1. Peningkatan lmtaq, ilmu, amal dan akhlaq	Potensi maju
	2. Mengembangkan sistem informasi IPTEK, komunikasi dan Media massa	2. Pengembangan IPTEK	Potensi maju
Misi 4	1. Memberdayakan Ekonomi rakyat	1. Pembinaan dan pengembangan UKM melalui penguatan modal dan kesempatan usaha	Potensi maju
		2. Menciptakan kebijakan yang kondusif	1. Peningkatan prasarana dan sarana serta layanan dasar UKM
	2. Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumberdaya domestik	2. Penerapan teknologi bagi UKM	Potensi maju
		3. Peningkatan kualitas SDM UKM	Potensi maju
		4. Peningkatan investasi penanaman modal	Potensi maju
	3. Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumberdaya domestik	1. Kemitraan UKM dengan usaha besar	Potensi maju
		2. Pengembangan pariwisata	Potensi maju
3. Pengembangan usaha perhutanan rakyat	Potensi maju		
Misi 5	1. Penegakkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih	1. Peningkatan kesejahteraan aparatur	Potensi maju
		2. Peningkatan peran dan fungsi linmas	Potensi maju
Misi 7	1. Mengharmoniskan tata ruang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan	1. Pengendalian tata ruang	Potensi maju
		2. Pengelolaan pertanahan	Potensi maju
	2. Mengendalikan pola-pola pemanfaatan SDA dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Pelestarian dan pengendalian lingkungan	Potensi maju
		2. Peningkatan sarana pengelolaan lingkungan	Potensi maju
		3. Pengendalian pencemaran	Potensi maju
4. Rehabilitasi tanah dan SDA lainnya	Potensi maju		
5. Penyehatan lingkungan	Potensi maju		

Tabel 3-6. Program-program termasuk berpotensi Tertinggal dengan skenario pengembangan dengan penguatan

Misi	Strategi	Program	Status Program
Misi 1	1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya manusia disegala bidang	1. Peningkatan kualitas keluarga	Potensi tertinggal
		2. Peningkatan Kualitas Ketengakerjaan	Potensi tertinggal
Misi 2	2. Mengembangkan sistem informasi IPTEK, komunikasi dan Media massa	1. Pengembangan jaringan dan sistem informasi	Potensi tertinggal
		2. Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan media massa	Potensi tertinggal
	1. Meningkatkan peran dan fungsi pemkab, DPRD dan lembaga masyarakat	1. Pembentukan dan peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah	Potensi tertinggal
Misi 5	1. Penegakkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih	1. Pembinaan, penerapan dan penegakkan hukum	Potensi tertinggal

Tabel 3-7. Program-program Termasuk Tertinggal dengan Skenario Pengembangan dengan Akselerasi

Misi	Strategi	Program	Status Program
Misi 4	1. Memberdayakan ekonomi rakyat	1. Pengembangan agribisnis	Tertinggal
	2. Meningkatkan keterkaitan usaha dengan sumber daya domestik	2. Kemitraan UKM dengan usaha besar	Tertinggal
Misi 6	1. Meningkatkan penyediaan sarana dan sarana penunjang dunia usaha dan lainnya	1. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan	Tertinggal
		2. Peningkatan prasarana dan sarana pengairan	Tertinggal
Misi 7	1. Mengharmoniskan tata ruang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan	1. Perencanaan Tata ruang	Tertinggal

3.4. Review Indikator

Indikator makro yang ditetapkan dalam Renstra 2002-2004 terdapat beberapa indikator yang perlu ditinjau ulang, terutama untuk 2 indikator dan satu indikator tambahan. Indikator yang perlu ditinjau ulang adalah sebagai berikut:

- a. Menyangkut harmonisasi angka laju pertumbuhan penduduk dan angka laju pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan senantiasa dianggap ada perkembangan jika laju pertumbuhan ekonomi (re) lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk (rp) ($re > rp$). Dalam Renstra pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk untuk Tahun 2002 ditargetkan sebagai berikut :

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4.20
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.76

- b. Dalam kecenderungan (trend) jangka panjang struktur ekonomi regional maupun nasional terdiri dari 2 arah yang berbeda, kedua arah tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Sektor primer proporsi PDRB-nya diskenariokan menurun secara gradual terhadap total PDRB dalam jangka panjang;
 - 2) Sektor sekunder dan tersier proporsi PDRB-nya diskenariokan mengalami peningkatan dalam jangka panjang.

Indikator	2002	2003	2004
Kontribusi sektor tersier	21.09	20.26	19.46
Seharusnya trend menaik, contoh	21.09	21.1	22.0

- c. Indikator aspek lingkungan sebaiknya tidak dalam bentuk parameter teknis (BOD, COD dll) tetapi cukup dengan indeks kualitas lingkungan atau persen target terhadap baku mutu (misalnya trend 200 %, 150 %, 100 % terhadap baku mutu).
- d. Misi sarana dan sarana belum terwakili indikatornya, misalnya rasio jalan beraspal terhadap jumlah panjang jalan, rasio rumah tangga yang terlayani air bersih, rasio rumah tangga yang memiliki MCK.

BAB IV

PEMETAAN ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.1. Kekuatan

1. Keunggulan lokasi yang strategis terhadap pusat pertumbuhan, sehingga memberikan peluang terjadinya keterkaitan ekonomi (*backward, forward, and regional linkage*) dengan pusat pertumbuhan.
2. Tersedianya lahan pertanian 82.552. Ha dan lahan pesisir yang luas sebagai basis perkembangan agribisnis.
3. Adanya kawasan Industri yang memadai untuk mendukung industri besar dan kecil.
4. Aksesibilitas yang cukup baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk mendatangkan bahan baku, maupun untuk memasarkan hasilnya ke pasar domestik dan internasional, terutama dengan berkembangnya jaringan jalan Tol Jakarta - Cikampek, sehingga produk wilayah Kabupaten Bekasi memiliki daya saing cukup kuat.
5. Adanya kewenangan daerah untuk mengelola kepentingan daerahnya secara otonom, sehingga akan memberikan pelayanan yang semakin cepat dan efisien.

4.2. Kelemahan

- 1) Mutu SDM masyarakat mayoritas berpendidikan formal SD dan tidak tamat SD, begitu juga aparatur pelayan belum memberikan pelayanan yang optimal dan profesional.
- 2) Sumber daya air yang layak, baik untuk air bersih, pertanian dan industri semakin terbatas, yang disebabkan meningkatnya penggunaan, menurunnya kualitas air permukaan dan debit yang tidak merata sepanjang tahun, terutama untuk kawasan Utara.
- 3) Langkanya sumber permodalan yang dapat diakses oleh usaha kecil dan menengah dalam kegiatan pembangunan daerah.
- 4) Aktivitas kelembagaan belum sepenuhnya berorientasi pada perencanaan strategis.
- 5) Penggunaan teknologi informasi belum optimal untuk melayani masyarakat dan aktivitas lainnya.

4.3. Peluang

- 1) Tersedianya aksesibilitas yang tinggi ke pasar ekspor melalui pelabuhan laut dan udara.
- 2) Diberlakukannya pasar bebas ASEAN, sehingga memudahkan untuk pergerakan orang, barang dan jasa.
- 3) Potensi pasar domestik, terutama dekatnya dengan pusat pertumbuhan nasional.
- 4) Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama adanya peluang berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta BUMD.
- 5) Akselerasi pembangunan melalui kewenangannya dalam otonomi daerah.

4.4. Ancaman

- 1) Adanya pencemaran lingkungan hidup, sehingga menurunkan produktivitas pertanian, terutama di kawasan utara.
- 2) Kongesti sarana dan prasarana sehingga menurunkan tingkat pelayanan, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu arus barang dan jasa dari pusat produksi ke dan dari pasar.
- 3) Masuknya urbans unskill (pengangguran terbuka), yang akan berimplikasi terhadap pelayanan sosial.
- 4) Adanya potensi kesenjangan wilayah dan antar golongan masyarakat.
- 5) Munculnya konflik budaya (SARA), dan dampak globalisasi yang menimbulkan kontra produktif.

4.5. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)

Prinsip dasar yang digunakan dalam menganalisis variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah :

- a. Bagaimana memaksimalkan kekuatan dengan meminimalkan ancaman (maksimi-mini).
- b. Bagaimana meminimalkan kelemahan dengan meminimalkan ancaman (mini-mini).
- c. Bagaimana memaksimalkan kekuatan dengan memaksimalkan peluang (maksimi-maksimi).
- d. Bagaimana meminimalkan kelemahan dengan memaksimalkan peluang (mini-maksimi).

a. Strategi Maksi – Mini

Kekuatan dan Ancaman	
<i>Kekuatan (Strength)</i>	<i>Ancaman (Threat)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan lokasi yang strategis terhadap pusat pertumbuhan, sehingga memberikan peluang terjadinya keterkaitan ekonomi (backward, forward and regional linkage) dengan pusat pertumbuhan. 2. Tersedianya lahan pertanian 82.552 Ha dan lahan pesisir yang luas sebagai basis perkembangan agribisnis. 3. Adanya kawasan Industri yang memadai untuk mendukung industri besar dan kecil. 4. Aksesibilitas yang cukup baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk mendatangkan bahan baku, maupun untuk memasarkan hasilnya ke pasar domestik dan internasional, terutama dengan berkembangnya jaringan jalan Tol Jakarta - Cikampek, sehingga produk wilayah Kabupaten Bekasi memiliki daya saing cukup kuat. 5. Adanya kewenangan daerah untuk mengelola kepentingan daerahnya secara otonom, sehingga akan memberikan pelayanan yang semakin cepat dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pencemaran lingkungan hidup, sehingga menurunkan produktivitas pertanian, terutama di kawasan utara. 2. Kongesti sarana dan prasarana sehingga menurunkan tingkat pelayanan, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu arus barang dan jasa dari pusat produksi ke dan dari pasar. 3. Masuknya urbans unskill (pengangguran terbuka), yang akan berimplikasi terhadap peayanan sosial. 4. Adanya potensi kesenjangan wilayah dan antar golongan masyarakat. 5. Munculnya konflik budaya (SARA) dan dampak globalisasi yang menimbulkan kontra produktif.
Strategi Maksi-Mini (S - T)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya alam, baik untuk sektor agribisnis maupun industri kecil dan besar, terutama mendorong investasi di kawasan industri. Namun pertumbuhan tersebut harus disertai dengan mitagasi dan pengendalian dampak lingkungan, serta melibatkan masyarakat setempat disekitar kawasan industri. (S1, S2, S3 –T1). 2. Pengaturan sarana dan prasarana secara terpadu agar memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat, terutama di pusat-pusat pertumbuhan dan padat penduduk (S4 - S2). 3. Meningkatkan kelembagaan nilai agama melalui peningkatan akhlak dan penegakan hukum untuk meminimkan dampak dekadensi moral, friksi antar masyarakat dan budaya kontra produktif (S5 - T5). 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui program memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. (S5 - T3,T4,). 	

b. Strategi Mini - Maksi

Kelemahan dan Peluang	
<i>Kelemahan (Weakness)</i>	<i>Peluang (opportunity)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu SDM masyarakat mayoritas berpendidikan formal SD dan tidak tamat SD, begitu juga penyelenggara pemerintahan kurang optimal dan profesional dalam memberikan pelayanan. 2. Sumber daya air yang layak, baik untuk air bersih, pertanian dan industri semakin terbatas, yang disebabkan meningkatnya penggunaan, menurunnya kualitas air permukaan dan debit yang tidak merata sepanjang tahun, terutama untuk Kawasan Utara. 3. Kurangnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh usaha kecil dan menengah dalam pembangunan daerah. 4. Aktivitas kelembagaan belum sepenuhnya berorientasi pada perencanaan strategis. 5. Penggunaan teknologi informasi belum optimal untuk melayani masyarakat dan aktivitas lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aksesibilitas yang tinggi ke pasar ekspor melalui pelabuhan laut dan udara. 2. Diberlakukannya pasar bebas ASEAN, sehingga memudahkan untuk pergerakan orang, barang dan jasa. 3. Potensi pasar domestik, terutama dekatnya dengan pusat pertumbuhan nasional. 4. Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama adanya peluang berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta BUMD. 5. Akselerasi pembangunan melalui kewenangannya dalam otonomi daerah.
Strategi Mini-Maksi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat (w1, w3, w4, w5 – o1, o2, o3, o4) baik individu maupun kelembagaan agar memiliki kapasitas dan akses terhadap sumber permodalan, teknologi, informasi, manajemen dan pasar, sehingga memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam pembangunan ekonomi. 2. Peningkatan/penggalian PAD dari sumberdaya yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. (w3 - o4) 3. Efisiensi penggunaan air dan mitigasi dan pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, yang cenderung mengancam Kawasan Utara, baik karena penurunan kualitas air maupun kuantitasnya, sehingga akan menurunkan produktivitas sektor primer. (w2 – o1, o2, o3, o4). 4. Diseminasi perencanaan strategis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaen Bekasi. (w4 - o5). 5. Penggunaan Teknologi informasi untuk memberikan pelayanan, pendidikan dan media massa (w4, o5). 	

c. Strategi Maksi - Maksi

Kekuatan dan Peluang	
<i>Kekuatan (Strenght)</i>	<i>Peluang (opportunity)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keunggulan lokasi yang strategis terhadap pusat pertumbuhan, sehingga memberikan peluang terjadinya keterkaitan ekonomi (backward, forward, and regional linkage) dengan pusat pertumbuhan. 2. Tersedianya lahan pertanian 82.552 Ha dan lahan pesisir yang luas sebagai basis perkembangan agribisnis. 3. Adanya kawasan Industri yang memadai untuk mendukung industri besar dan kecil. 4. Aksesibilitas yang cukup baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk mendatangkan bahan baku, maupun untuk memasarkan hasilnya ke pasar domestik dan internasional, terutama dengan berkembangnya jaringan jalan Tol Jakarta - Cikampek, sehingga produk wilayah Kabupaten Bekasi memiliki daya saing cukup kuat. 5. Adanya kewenangan daerah untuk mengelola kepentingan daerahnya secara otonom, sehingga akan memberikan pelayanan yang semakin cepat dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aksesibilitas yang tinggi ke pasar ekspor melalui pelabuhan laut dan udara. 2. Diberlakukannya pasar bebas ASEAN, sehingga memudahkan untuk pergerakan orang, barang dan jasa. 3. Potensi pasar domestik, terutama dekatnya dengan pusat pertumbuhan nasional. 4. Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama adanya peluang berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa serta BUMD. 5. Akselerasi pembangunan melalui kewenangannya dalam otonomi daerah.
Strategi Maksi - Maksi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi, yang dapat memenuhi baik pasar domestik, maupun pasar internasional. (s1, s2 – o1, o2, o3). 2. Promosi Investasi baik PMA maupun PMDN untuk di Kawasan industri (s3 – o1, o2, o3). 3. Mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan baik di kawasan perdesaan maupun kota (s2 - s3 – o1, o2, o3). 4. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi ditingkatkan efisiensinya serta ditujukan untuk membangun Good Governance (s4, s5 - o5). 5. Meningkatkan kemampuan Keuangan daerah melalui penggalian sumber-sumber yang sah (s5 - o4). 	

d. Strategi Mini - Mini

Kelemahan dan Ancaman	
<i>Kelemahan (Weakness)</i>	<i>Ancaman (threat)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu SDM masyarakat mayoritas berpendidikan formal SD dan tidak tamat SD, begitu juga penyelenggara pemerintahan kurang optimal dan profesional dalam memberikan pelayanan. 2. Sumber daya air yang layak, baik untuk air bersih, pertanian dan industri semakin terbatas, yang disebabkan meningkatnya penggunaan, menurunnya kualitas air permukaan dan debit yang tidak merata sepanjang tahun, terutama untuk kawasan Utara. 3. Langkanya sumber permodalan yang dapat diakses oleh usaha kecil dan menengah dan pembangunan daerah. 4. Aktivitas kelembagaan belum sepenuhnya berorientasi pada perencanaan strategis. 5. Penggunaan teknologi informasi belum optimal untuk melayani masyarakat dan aktivitas lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pencemaran lingkungan hidup, sehingga menurunkan produktivitas pertanian, terutama di Kawasan utara. 2. Kongesti sarana dan prasarana sehingga menurunkan tingkai pelayanan, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat mengganggu arus barang dan jasa dari pusat produksi ke dan dari pasar. 3. Masuknya urbans unskill (pengangguran terbuka), yang akan berimplikasi terhadap pelayanan sosial. 4. Adanya potensi kesenjangan wilayah dan antar golongan masyarakat. 5. Munculnya konflik budaya (SARA), dan dampak globalisasi yang menimbulkan kontra produktif.
Strategi Mini - Mini	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dampak lingkungan (w1 – t1). 2. Pelayanan air bersih bagi masyarakat (w2 – t1). 3. Pembangunan sarana dan prasarana layanan dasar (w1, w2, w3 - t2, t3). 4. Peningkatan skill masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan (w3 - t3). 5. Pemberdayaan UKM untuk menuju pada pemeratan ekonomi (w3-t4). 6. Penggunaan teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan yang efisien dan mewujudkan Good governance (w4 - t2). 7. Meningkatkan pendidikan agama, transformasi budaya dan penegakan hukum agar terhindari dari dampak globalisesi dan dekadensi moral (w4, w5 - t5). 	

BAB V

VISI MISI

5.1. Pernyataan Visi

Berdasarkan analisis visi misi yang diuraikan pada Bab 2, menunjukkan bahwa pernyataan visi yang termuat dalam Perda 33 Tahun 2001 masih sah dan relevan serta dapat mengakomodasikan Visi Bupati dan Jawa Barat. Untuk itu pernyataan visi kembali kepada Perda Nomor 33 Tahun 2001, yaitu :

MANUSIA UNGGUL YANG AGAMIS BERBASIS AGRIBISNIS DAN INDUSTRI BERKELANJUTAN

Kata unggul ditujukan untuk menjelaskan keunggulan ketiga pilar, yakni unggul dalam **sumber daya manusia** dengan **basis keunggulan pada agribisnis dan industri**. Keunggulan tersebut merupakan penjabaran dari keunggulan bersaing (competitive advantages) yang secara pragmatis menunjukkan adanya perkembangan positif untuk variabel-variabel ketiga pilar di atas dan mengalami perkembangan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya.

Manusia unggul menyangkut karakter kualitas manusia. Secara konvergen maka pengertian manusia unggul adalah manusia yang memiliki ciri - ciri sebagai berikut: 1) Fisik : sehat dan terampil, 2) Intelektual : cerdas kreatif dan inovatif, 3) Emosional : mandiri, berbudaya dan demokratis, dan 4) Spritual : beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Berbasis Agribisnis merupakan sebuah sistem. Sistem merupakan keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya sehingga merupakan satu kesatuan kerja dan manajemen. Agribisnis terdiri dari 3 komponen utama dan satu komponen penunjang. Komponen utama terdiri dari 1) Sub Sistem Input Pertanian (sarana produksi atas bagian hulu), 2) Sub Sistem Produksi (Kegiatan produksi), 3) Sub Sistem Pengolahan dan Manufaktur, 4) Sub Sistem Penunjang (kebijakan pemerintah, layanan pemerintah, kredit perbankan dan pembangunan infrastruktur).

Pembangunan yang berbasis agribisnis adalah pembangunan perekonomian rakyat yang digerakkan oleh sistem agribisnis yang berimbang antara hulu, kegiatan produksi hilir dan penunjangnya, sehingga seluruh komponen menjadi sinergis dan dapat menciptakan keunggulan yang berdaya saing tinggi, baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional.

Berbasis industri adalah kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri, baik yang meliputi industri pengolahan, industri perbankan, industri pariwisata maupun industri jasa lainnya yang selalu tertuju pada keunggulan bersaing. Industri yang unggul ditunjukkan oleh kinerja produknya berupa barang dan jasa yang memiliki daya saing yang tinggi.

Agribisnis dan industri kecil menjadi sektor ekonomi basis, artinya kedua sektor menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan ekonomi, kedua sektor tersebut juga mencerminkan keseimbangan struktur ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier.

Pembangunan berkelanjutan merupakan arah dari proses dalam menciptakan keunggulan ketiga pilar di atas, sehingga pembangunan harus senantiasa memperhatikan dan mengintegrasikan aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Pembangunan yang berkeadilan antar kelompok masyarakat, antar waktu (generasi sekarang dan generasi akan datang) dan antar wilayah (wilayah kota dan desa).
- 3) Pemberdayaan masyarakat (empowering), terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat paling miskin (poorest of the poor), yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita.
- 4) Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu berprestasi dalam pembangunan.

5.2. Pernyataan Misi

Berdasarkan analisis visi misi yang diuraikan pada Bab 2, menunjukkan bahwa pernyataan misi yang termuat dalam Perda 33 Tahun 2001 masih sah dan relevan serta dapat mengakomodasikan Visi Bupati dan Jawa Barat. Untuk itu pernyataan visi kembali kepada Perda Nomor 33 Tahun 2001, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas Manusia yang sehat, pintar dan benar
- 2) Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat
- 3) Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis
- 4) Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
- 5) Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban

- 6) Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu
- 7) Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan analisis misi di atas maka misi yang dituangkan dalam Perda Nomor 33 Tahun 2001 dapat mengakomodasikan atau dapat menampung seluruh misi Jawa Barat dan Bupati. Dengan demikian maka baik secara materil maupun yuridis akan terpenuhinya misi Jawa Barat serta dapat terakomodasikannya komitmen Bupati (misi) untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penjelasan Misi :

1. Meningkatkan kualitas Manusia yang sehat, pintar dan bener

Secara harfiah kualitas adalah derajat atau taraf. Meningkatkan kualitas SDM adalah meningkatnya derajat kecakapan dan kecerdasan masyarakat Bekasi, yang mana kecerdasan tersebut dilandasi oleh akhlaq yang mulia sehingga taat pada hukum yang berlaku atau dengan istilah lain, masyarakat yang pintar dan bener.

2. Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.

Secara harfiah profesional adalah kepandaian khusus untuk menjalankan kerja. Dengan demikian meningkatkan profesionalitas bermakna 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan tuntutan zaman atas perubahan-perubahan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam, 2) meningkatkan kemampuan standar dan kesesuaian bidang yang dikuasainya bagi pemangku jabatan organisasi kelembagaan (*the right man on the right place*) sehingga memiliki kemampuan manajerial yang sesuai dengan fungsi dan struktur lembaga yang diembannya, terutama lembaga pemerintah dan DPRD, yang selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan amanat dan melayani masyarakat secara optimal.

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme dapat menjadi dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*transparan, akuntabel dan demokratis*), yang pada gilirannya akan melahirkan kepercayaan, komitmen dan tanggung jawab masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Lebih jauh, UNDP dalam LAN mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus melayani setiap *stakeholder*.
- e. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga - lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan perubahan yang akan terjadi.

Karakteristik di atas merupakan bagian yang utuh, yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. LAN lebih jauh menguraikan bahwa wujud dari *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, pembangunan

berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, menurut LAN konsep *good governance* memiliki dua orientasi, yaitu :

Pertama, mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, *accountability*, *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan administrasi berfungsi secara efektif dan efisien.²

Demokrasi dan juga supremasi hukum seyogyanya menjadi pangkal tolak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat diharapkan unsur-unsur seperti keterbukaan, dapat diawasi, akuntabilitas dan lain sebagainya dapat diwujudkan. Mardiasmo, menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, transparansi lebih menekankan adanya suatu penjelasan secara rinci dan komunikatif mengenai manfaat dan dampak suatu rencana kebijakan/program/proyek serta adanya interaksi informasi yang dibangun antar *stakeholder*, informasi harus dikemas sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh stakeholder.³

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa hak atas informasi merupakan bagian integral dari pengembangan demokrasi yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan (*transparency*) atas berbagai informasi pemerintah merupakan pondasi untuk membangun *good governance*.

Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah yang lebih ditekankan pada respon pemerintah terhadap protes/keluhan masyarakat atas penyimpangan yang berkaitan dengan kebijakan yang direncanakan atau dilaksanakan. Dimana mereka mengadu, apa tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan seterusnya.

² *Ibid.* Hal. 6.

³ [http : // www. Transparansi.co.id/artikel/transparansi publik](http://www.Transparansi.co.id/artikel/transparansi publik).

The Oxford Advance Learner's Dictionary dalam Lembaga Administrasi Negara, mengartikan akuntabilitas sebagai "*required or expected to give an explanation for one's action*". Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁴

Dalam konteks otonomi daerah yang dimaksud dengan penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD yang memiliki fungsi masing-masing. DPRD berfungsi sebagai pembuat kebijakan bersama-sama dengan Kepala Daerah (Pemerintah Daerah). Ketika kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, DPRD berfungsi melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan.

Pandangan yang hampir sama dikemukakan pula oleh Asian Development Bank (ADB) yang menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Pertemuan ini juga menyepakati tiga elemen penting dari *Good Governance* yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, dan (3) *participation*. Kesimpulan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran bahwa tanpa keinginan mewujudkan *Good Governance* tidak mungkin dapat melakukan pembangunan dengan baik.⁵

Menyadari pentingnya pelaksanaan *Good Governance*, telah ada *political will* para pembentuk Undang-Undang. Paling tidak, baik secara eksplisit maupun implisit, *political will* ini dapat dilihat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam kedua produk hukum tersebut dapat ditemui beberapa prinsip dasar pelaksanaan *Good Governance* pada era otonomi daerah.

Pertama, akuntabilitas. Ini diterjemahkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dari sini dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses sampai hasil akhir penyelenggaraan negara.

⁴ *Ibid.*, Hal. 21.

⁵ *Asian Development Bank (ADB), makalah seminar Good Governance, Fukuoka Jepang, 10 Mei 1997*

Kedua, transparansi UU No. 28 Tahun 1999 yang menerjemahkan ini sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan negara. Ini adalah peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih jelas peran serta masyarakat ini ditentukan dalam PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, dalam Pasal 2 Ayat (1) dikatakan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk : (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; (b) hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; dan (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.

Ketiga, partisipasi. Pengertian ini tidak ditemui dalam UU No. 28 Tahun 1999, tetapi kalau dipahami misi UU No. 22 Tahun 1999 maka partisipasi masyarakat adalah hal yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam teori pengambilan keputusan, semakin banyak partisipasi dalam proses kelahiran sebuah policy, maka dukungan akan semakin luas terhadap kebijakan tersebut.

3. Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis

Masyarakat didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1986).

Kebudayaan adalah masyarakat yang memiliki keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat sehingga memiliki identitas yang jelas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya.

Masyarakat berbudaya dan demokratis yang bernuansa agama adalah masyarakat yang mampu melakukan saling interaksi secara dialogis (tidak anarkis) dan mampu mengungkapkan segala aspirasi dan tindakannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, santun, menghargai perbedaan pendapat. Segala tindakan dan perilakunya selalu berpedoman pada nilai-nilai agama.

4. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan

Menurut Mubyarto (1999) Ekonomi Rakyat adalah sistem ekonomi yang dioperasionalkan melalui pemihakan dan perlindungan pada usaha ekonomi kecil dan menengah. Usaha ekonomi rakyat kebanyakan berperan dalam usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pada umumnya berbasis di pedesaan. Di samping itu, ekonomi rakyat banyak pula berperan dalam industri kerajinan, industri kecil serta dalam perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya baik di pedesaan maupun di kota.

Istilah memberdayakan adalah mengacu pada upaya meningkatkan kemampuan kewirausahaan serta meningkatkan kemampuan mengatasi kendala berusaha. Kendala tersebut dapat diidentifikasi berupa akses ke pasar, struktur permodalan, organisasi dan manajemen, teknologi dan jaringan usaha. Sedangkan bagi perusahaan besar perlu didorong untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan menengah terutama dalam bentuk jaringan permodalan, transformasi teknologi produksi dan pemasaran.

5. Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, untuk itu wilayah kabupaten sebagai bagian dari wilayah nasional harus menempatkan hukum nasional sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan hak-haknya yang mendasar terutama dalam kebebasan menjalankan agamanya, terlindungi jiwa, keturunan, kehormatan dan harta, dengan demikian setiap individu dalam masyarakat benar-benar mendapatkan kepastian hukum dalam meraih masa depannya.

Di samping itu hukum dan peraturan yang berlaku menjadi dasar untuk menciptakan ketertiban masyarakat, terutama dalam menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

6. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu

Mengembangkan prasarana dan sarana publik adalah upaya untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana untuk melayani masyarakat, baik melalui peningkatan pemeliharaan maupun melalui pengadaan baru. Sedangkan istilah terpadu adalah upaya membangun dan memanfaatkan prasarana dan sarana dilakukan secara menyeluruh (tidak sektoral), dengan mempertimbangkan, waktu, kemampuan pendanaan, optimalisasi pelayanan, pemerataan pelayanan, dan daya dukung lingkungan.

7. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.

Tata ruang merupakan wujud perencanaan dalam alokasi sumber daya alam termasuk kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non-pertanian (permukiman, industri dan kawasan lindung). Kawasan budidaya pertanian perlu mendapat perlindungan agar sesuai dengan fungsinya dan tetap produktif. Begitu pula kawasan budidaya non pertanian perlu dikembangkan agar lebih efisien dalam menunjang kelestarian lingkungan. Berbagai kawasan tersebut perlu diharmonisasikan sehingga dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, perkembangan antar wilayah kecamatan sehingga seluruh perkembangan berlangsung dalam satu kesatuan wilayah kabupaten.

Sedangkan yang dimaksud dengan memperdulikan lingkungan adalah perkembangan penggunaan ruang wilayah Kabupaten harus mengindahkan atau memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan serta mematuhi kaidah hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku.

BAB VI

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

6.1. Kewenangan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 11 adalah kewenangan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Umum
2. Kesehatan
3. Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pertanian
5. Perhubungan
6. Industri dan perdagangan
7. Penanaman modal
8. Lingkungan hidup
9. Pertanahan
10. Koperasi
11. Tenaga Kerja

Kemudian untuk menjalankan kewenangan tersebut UU No. 22 Tahun 1999 berdasarkan pasal 4 dinyatakan bahwa "dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat".

Untuk menjalankan kewenangan berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD tersebut maka pemerintah daerah menjalankan pemerintahan melalui 21 bidang pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan
2. Bidang Pertanian
3. Bidang Perikanan dan Kelautan
4. Bidang Pertambangan dan Energi
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
6. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
7. Bidang Perkoperasian

8. Bidang Penanaman Modal
9. Bidang Tenaga Kerja
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Pemukiman
15. Bidang Pekerjaan Umum
16. Bidang Perhubungan
17. Bidang Lingkungan Hidup
18. Bidang Kependudukan
19. Bidang Olahraga
20. Bidang Kepariwisata
21. Bidang Pertanian

Untuk Kabupaten Bekasi meliputi 15 Bidang Pemerintahan yang dalam implementasinya sudah mengakomodir ke 21 bidang pemerintahan, hal ini disebabkan besar kecilnya lingkup bidang pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Ke 15 bidang pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan
2. Bidang Pertanian
3. Bidang Perikanan dan kelautan
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
5. Bidang Tenaga kerja
6. Bidang Kesehatan
7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
8. Bidang Sosial
9. Bidang Penataan Ruang
10. Bidang Pemukiman
11. Bidang Pekerjaan Umum
12. Bidang Perhubungan
13. Bidang Lingkungan Hidup
14. Bidang Kependudukan
15. Bidang Kepariwisata

Dengan demikian visi dan misi akan diimplementasikan berdasarkan kewenangan yang diwajibkan serta apresiasi pemerintah daerah dalam mengembangkan organisasinya.

6.2. Isu Pokok Pembangunan

a. Perkembangan Program Renstra 2002

Berdasarkan hasil svaluasi pencapaian visi misi Tahun 2002, telah diketahui beberapa kelompok program dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yakni kelompok yang mengalami kemajuan, kelompok program tertinggal dan kelompok berpotensi tertinggal, ketiga kelompok dicantumkan dalam Tabel 6-1.

Tabel 6-1. Perkembangan Program pada Tahun 2002 dan Perlakuannya

Perkembangan	Perlakuan Program
Berjalan dengan maju	<i>Business as Usual</i> , Implementasi program seperti tahun yang bersangkutan untuk mempertahankan kinerjanya.
Berpotensi maju Berpotensi tertinggal	Penguatan (<i>strengthening</i>) baik melalui alokasi dana maupun manajemen proyek, terutama peningkatan efektivitas program.
Tertinggal	Akselerasi, atau percepatan melalui perlakuan khusus.

- a. Berkembang normal sehingga mengalami kemajuan, perlakuan kelompok program ini adalah *business as usual*, yakni mempertahankan kinerja seperti tahun sebelumnya.
- b. Berkembang dan berpotensi tertinggal berpotensi maju, perlakuan kelompok program ini adalah penguatan (*strengthen*) baik melalui pendanaan maupun manajemen program sehingga mengalami peningkatan efektivitas program.
- c. Perkembangannya tertinggal. Perlakuan kelompok program ini adalah melalui percepatan atau akselerasi. Perlakuan akselerasi dapat dilakukan melalui perlakuan khusus baik pendanaan maupun pelaksanaannya, kalau perlu bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program.

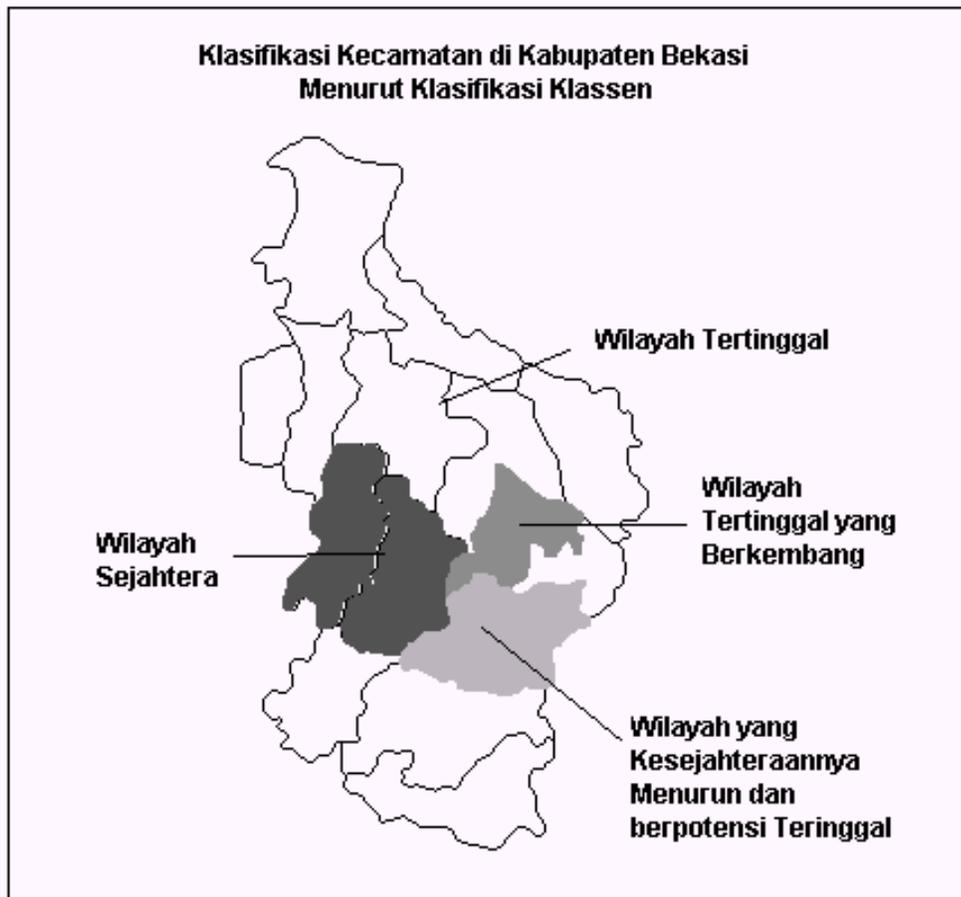
b. Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah dari waktu ke waktu relatif dinamis. Salah satu dinamika pembangunan yang cukup penting adalah perkembangan ekonomi, terutama Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan laju pertumbuhannya dan PDRB per kapita, maka dapat dilihat dinamika perkembangannya yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok ;

- a. Wilayah sejahtera
- b. Wilayah Tertinggal

- c. Wilayah berpotensi tertinggal
- d. Wilayah Tertinggal yang berkembang.

Pada Pembangunan Periode 1994 - 1998 Wilayah sejahtera diraih oleh Kecamatan Lemahabang, Tambun, dan Cibitung dan yang tertinggal meliputi Kecamatan Setu, Serang, Kedungwaringin, Tambelang, Sukatani, Pebayuran, Muaragembong. Penyebarannya dapat dilihat dalam gambar 6-1 di bawah ini.



Gambar 6-1. Penyebaran WilayahTertinggal Pada Tahun 1998.

Pada Tahun 2002 empat tahun berikutnya, maka jumlah wilayah kecamatan yang tergolong sejahtera adalah : Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat dan Tambun Selatan. Namun wilayah yang tergolong tertinggal semakin meningkat, yaitu meliputi kecamatan sebagai berikut : Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin dan Muaragembong.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan Tahun 2002 mengarah pada kesenjangan antar wilayah Kecamatan. Terutama Wilayah Utara semakin tertinggal dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan perkembangan indikator Renstra pada Tahun 2002 dan perkembangan wilayah Tahun 2002, maka kebijakan pembangunan dalam periode 5 tahun ke depan, wilayah Utara dan Kawasan Ibu Kota Kabupaten harus mendapatkan perhatian khusus. Perhatian khusus ini terutama ditujukan pada kelompok program tertinggal dan perlu perlakuan akselerasi.

Tabel 6-2. Klasifikasi Kecamatan di Kabupaten Bekasi Menurut Klasifikasi Klassen pada Tahun 2002

PDRB per Kapita (y)/ Laju Pertumbuhan Penduduk (r)	$r1 > y$	$y1 < y$
$r1 > r$	Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh (Wilayah Sejahtera) <i>Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan</i>	Wilayah Berkembang
$r1 < r$	Wilayah yang Kesejateraanannya menurun	Wilayah Belum Berkembang <i>Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Karangbahagia, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin, Muaragembong</i>

Keterangan:

$r1$ = Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan

$y1$ = Pendapatan Perkapita Kecamatan

r = Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten

y = Pendapatan Per Kapita Rata-Rata Kabupaten

6.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi yang diembannya adalah sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan kualitas Manusia yang *sehat pintar dan bener*

Tujuan	Sasaran
a. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pelayanan agar mencapai manusia yang, sehat, terampil, cerdas, dan berakhlak mulia	1. Terwujudnya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia/ berbudi luhur. 2. Terwujudnya masyarakat yang sehat.
b. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan permintaan masyarakat	1. Terwujudnya masyarakat yang terampil dan kompeten dalam berbagai bidang ketenagakerjaan. 2. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai. 3. Terwujudnya perlindungan bagi tenaga kerja.

Misi 2. Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat

Tujuan	Sasaran
a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan efisien.	1) Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan umum
b. Mewujudkan kemandirian dan keunggulan daya saing daerah	1) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah 2) Meningkatnya peran dan fungsi perangkat daerah 3) Meningkatnya pengembangan potensi daerah
c. Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	Terakomodirnya seluruh kepentingan pembangunan Tidak ada tumpang tindihnya kegiatan pembangunan
d. Mengembangkan akses informasi dibidang dunia usaha, pelayanan publik dan sektor-sektor lainnya	Penggunaan Teknologi Informasi untuk pelayanan masyarakat dan administrasi
e. Memantapkan sistem evaluasi kinerja dan jenjang karir aparatur untuk membina kualitas, produktivitas dan responsibilitas untuk perbaikan kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparat	Meningkatnya kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan

**Misi 3. Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya,
Demokratis dan agamis**

Tujuan	Sasaran
Menciptakan rasa setia kawan dan partisipatif dalam sosial politik namun santun, demokratis, berbudaya, aman dan tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbinanya partisipasi masyarakat, khususnya di bidang Kamtibmas 2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis dan terbangunnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 3) Terwujudnya kehidupan berpolitik sesuai dengan peraturan yang berlaku 4) Terwujudnya kesejahteraan bagi keluarga miskin, anak terlantar, anak yatim, lanjut usia dan penyandang cacat 5) Tertanggulangnya masalah pasca bencana alam, layanan sosial bagi tindak kekerasan dan pengungsi 6) Terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana, anak jalanan, WTS, dan pengidap Narkoba 7) Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat

**Misi 4. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis
pada ekonomi kerakyatan**

Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk menghasilkan produk pertanian	Terwujudnya peningkatan usaha pertanian rakyat yang berbasis agribisnis;
b. Meningkatkan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk menghasilkan produk peternakan, perikanan dan kelautan	Peningkatan kemampuan nelayan dan pembudidayaan ikan untuk menghasilkan peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya
c. Meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk kerajinan rakyat dan industri kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha kecil dan menengah, masyarakat, industri rumah tangga dan aneka jasa 2) Meningkatnya jumlah masyarakat luas yang menjadi pelaku usaha produksi/pengolahan, perdagangan dan aneka jasa

d. Meningkatkan daya saing produk daerah dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya untuk meningkatkan minat investasi.	1) Berkembangnya keterkaitan dan kemitraan usaha UKMK dengan pengusaha besar. 2) Meningkatnya akses terhadap teknologi, informasi, dan SDM dari setiap UKM
e. Meningkatnya kemampuan industri besar untuk terus berkembang melalui peningkatan kapasitas dan investasi baru	Tersedianya informasi peluang investasi yang cepat dan akurat dan prosedur perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan memiliki kepastian

Misi 5. Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, ketenangan ketentraman masyarakat	1) Tersedianya peraturan-peraturan hukum yang mendukung terhadap semua aktifitas masyarakat. 2) Terwujudnya kepastian hukum bagi anggota masyarakat 3) Tersosialisasinya produk hukum kepada masyarakat secara tepat, cepat dan akurat 4) Terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan-peraturan hukum

Misi 6. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan / permukiman	Meningkatnya penyediaan layanan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang memadai dan memenuhi standar
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana serta layanan dasar masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan yang sesuai dengan standar bangunan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang merata baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan
Meningkatkan mobilitas dan hubungan antar wilayah dengan aman, tertib dan lancar	Pengembangan sistem manajemen transportasi dan peningkatan sarana perhubungan

Misi 7. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan

Tujuan	Sasaran
a. Meningkatkan tata ruang yang partisipatif, terpadu, serasi, selaras dan seimbang serta berdayaguna	Tersusunnya rencana tata ruang wilayah dan kawasan tertentu/khusus sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang
b. Mewujudkan ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah

c. Menciptakan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta terkendali-nya kualitas sumber daya alam	Terkendalnya kerusakan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam.
d. Meningkatkan sumberdaya alam dan lingkungan serta seni budaya dalam pariwisata	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan yang potensial untuk dijadikan objek wisata alam dan mewujudkan seni dan benda sejarah lainnya sebagai objek wisata.

6.4. Strategi Kebijakan dan Program berdasarkan Bidang Pemerintahan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau secara kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

6.4.1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

A. Umum

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi oleh Pemerintah Daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberian layanan. Dalam rangka *good governance*, pemberian layanan tersebut melibatkan sektor swasta dan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi berbagai prinsip, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan lain-lain.

Good governance menunjuk pada proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholder* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan semua pihak, yakni pemerintah, pihak swasta dan rakyat dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas.

Otonomi daerah diartikan sebagai pemerintah sendiri oleh rakyat yang berada di bagian wilayah nasional mengandung arti pengakuan atas kemandirian masyarakat setempat. Kemandirian yang dimaksud tercermin dalam prakarsa dan aktivitas sendiri dari masyarakat setempat dalam perumusan.kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lebih jauh Bhenyamin Hoessein menjelaskan pengertian otonomi daerah

sebagai berikut : Pertama, otonomi daerah dimiliki oleh masyarakat. Kedua penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan prakarsa sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, penyelenggaraan otonomi oleh lembaga-lembaga pemerintahan setempat yang terlepas dari pemerintah pusat. Keempat, penyelenggaraan otonomi didasarkan aspirasi masyarakat. Kelima, tujuan akhir penyelenggaraan otonomi adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat.

Pandangan yang hampir sama dikemukakan pula oleh Asian Development Bank (ADB) yang menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan faktor penting dalam sebuah proses pembangunan. Pertemuan ini juga menyepakati tiga elemen penting dari *Good Governance* yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, dan (3) *participation*.

Pertama, akuntabilitas. Ini diterjemahkan oleh UU No. 28 Tahun 1999 sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dari sini dapat diketahui bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap proses sampai hasil akhir penyelenggaraan negara.

Kedua, transparansi UU No. 28 Tahun 1999 yang menerjemahkan ini sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan negara. Ini adalah peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih jelas peran serta masyarakat ini ditentukan dalam PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, dalam Pasal 2 Ayat (1) dikatakan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk : (a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; (b) hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; dan (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.

Ketiga, partisipasi. Pengertian ini tidak ditemui dalam UU No. 28 Tahun 1999, tetapi kalau dipahami misi UU No. 22 Tahun 1999 maka partisipasi masyarakat adalah hal yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam teori pengambilan keputusan, semakin banyak partisipasi dalam proses kelahiran sebuah *policy*, maka dukungan akan semakin luas terhadap kebijakan tersebut.

B. Permasalahan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah relatif baru, pengimplementasiannya dalam penyelenggaraan daerah membutuhkan proses adaptasi dan proses pembelajaran, namun demikian upaya optimalisasi pelaksanaannya harus tetap diupayakan.

C. Matriks Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

Tabel 6-3. Matriks Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
a. Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi Lembaga Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan.2. Peningkatan pelaksanaan kewenangan daerah dan kerjasama antar daerah.3. Pelaksanaan Koordinasi lembaga perangkat daerah dan DPRD, instansi vertikal dan pemerintah lebih atas.4. Pembinaan Perangkat Daerah dan fasilitasi sarana prasarana Kecamatan
b. Pengembangan informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemeritahan yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Program Kehumasan.2. Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
c. Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian untuk mewujudkan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatkan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM).2. Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian masyarakat.3. Peningkatan pengembangan usaha daerah melalui BUMD.
d. Pelayanan administrasi pembangunan yang tertib dan transparan	<ol style="list-style-type: none">1. Terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.3. Program Pengoptimalisasian Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari APBD, APBD Propinsi, APBN dan BIN
e. Pengembangan dan mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan kewilayahan Kecamatan2. Pelayanan Masyarakat pada tingkat Kecamatan
f. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan	Pelayanan Masyarakat pada tingkat desa/kelurahan

g. Pengembangan pelayanan kehidupan beragama dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Peningkatan koordinasi Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan dan peningkatan kualitas keagamaan 3. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama
h. Pengelolaan dan Pemeliharaan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Perlengkapan Pemerintah Daerah
i. Meningkatkan Penataan Kelembagaan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima yang mendukung Kinerja Instansi	Pengelolaan Rumah Tangga Pemerintah daerah
j. Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan aparatur yang bersih dan bertanggung jawab	Pemeriksaan Reguler dan Non Reguler
k. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas kinerja pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan kemampuan Pengelolaan Keuangan daerah
l. Meningkatkan kualitas aparat pemerintah desa dan kinerja kelembagaan desa untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pemerintahan desa 2. Pengelolaan Asset Desa
m. Meningkatkan Penataan Kelembagaan dan Meningkatkan Pelayanan Prima yang mendukung Kinerja Instansi	Pembentukan dan Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
n. Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Operasional Peningkatan pendapatan
o. Penyelenggaraan dan pengoptimalisasian perencanaan di segala bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengoptimalisasian Dokumen Perencanaan 2. Program Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah Swasta. 3. Program Pelaksanaan Tertib Sistem Perencanaan.
p. Pengembangan sistem informasi pembangunan, kearsipan dan perpustakaan dalam rangka pemberian pelayanan prima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 2. Peningkatan pengelolaan jaringan dan sistem informasi pemerintah daerah.
q. Meningkatkan kualitas PNS dan pelayanan administrasi kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan administrasi kepegawaian 2. Peningkatan pembinaan karier dan prestasi kerja PNS 3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
r. Pengembangan dan tata pelayanan laksana kegiatan DPRD	Pelaksanaan dan Pengembangan Tata Laksana Rumah Tanqqa DPRD
s. Meningkatkan ketertiban masyarakat dan taat hukum	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

t. Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa	Terciptanya lingkungan masyarakat plural yang kondusif.
u. Mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi	Pengembangan kearifan budaya berpolitik.
v. Pengembangan dan mewujudkan produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian produk hukum daerah. 2. Pembinaan dan bantuan hukum. 3. Penyusunan produk hukum daerah dan pendokumentasian hukum. 4. Terciptanya pembinaan dan penerapan penegakan hukum.

6.4.2. Bidang Pertanian

A. Umum

Kegiatan pertanian adalah upaya mengkombinasikan sumberdaya alam dengan masukan input produksi dan manajemen untuk menghasilkan hasil pertanian, yang digolongkan ke dalam sektor primer, berupa hasil tanaman pangan, perkebunan, ternak dan perikanan. Hasil pertanian sebagian besar dijual dan sebagian lainnya diolah kemudian dijual. Petik-jual, petik-olah-jual merupakan salah satu pendekatan agribisnis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah.

Kabupaten Bekasi memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk menjadi basis kegiatan pertanian, disamping itu kegiatan pertanian merupakan lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu upaya membangun kesejahteraan masyarakat Bekasi, tidak terlepas dengan pembangunan pertanian.

B. Permasalahan

Kegiatan pertanian sangat terkait dengan faktor alam yang berada diluar kendali manusia, terutama faktor iklim, oleh karena itu hasil kegiatan bidang pertanian sering dihadapkan pada resiko alam cukup besar. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah output atau hasil produksi yang selalu berfluktuatif, oleh karena itu pertumbuhan sektor pertanian umumnya relatif kecil.

Demikian pula dengan kondisi masyarakat petani yang sebagian besar sebagai petani penggarap bukan pemilik dengan skill terbatas dan menggunakan sistem pengelolaannya secara tradisional, ini berdampak pada hasil produksi pertanian yang kurang optimal dan status sosial ekonomi yang belum memadai. Oleh karena itu tertantang untuk memajukan bidang pertanian sesuai dengan Sub Visi Agribisnis dan Industri yang berkelanjutan.

C. Matriks Bidang Pertanian

Tabel 6 - 4. Matriks Bidang Pertanian

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Pembangunan pertanian berbasis agribisnis melalui kelembagaan kerjasama	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sumberdaya pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan2. Peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani dan pengembangan pola kemitraan3. Pengembangan komoditas tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan Peningkatan prasarana dan sarana pertanian.4. Pengembangan kelestarian sumber daya alam perkebunan dan kehutanan.

6.4.3. Bidang Perikanan dan Kelautan

A. Umum

Sumberdaya laut dan pesisir menghasilkan sumberdaya yang cukup potensial, terutama untuk menghasilkan ikan dan sumberdaya hayati non ikan. Secara teoritis kedua sumberdaya hayati tersebut termasuk sumberdaya yang dapat dipulihkan. Namun pada kenyataannya karena eksploitasi lebih besar dari potensi lestariannya, maka dapat menimbulkan kerusakan sumberdaya yang sulit dipulihkan yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini sesuai dengan data bahwa Laut Utara Jawa telah menunjukkan tangkap lebih (*overfishing*) dan beberapa wilayah sumberdaya laut dan pesisir mengalami kerusakan terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Untuk itu pembangunan perikanan dan kelautan diletakkan pada kegiatan budidaya baik budidaya ikan, perikanan tangkap maupun kegiatan budidaya sumberdaya laut hayati non ikan (misalnya rumput laut).

B. Permasalahan

Permasalahan utama bidang perikanan dan kelautan adalah rusaknya sumberdaya laut dan pesisir, terutama hutan mangrove, infrastruktur pertambakan serta menurunnya kualitas sungai yang dapat mempengaruhi produktivitas perairan. Begitu juga kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya masih banyak yang tergolong miskin.

C. Matriks Bidang Perikanan dan Kelautan

Tabel 6 - 5. Matriks Bidang Perikanan dan Kelautan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan diarahkan pada pendekatan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya melalui peningkatan pendapatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sumberdaya ternak, laut dan pesisir.2. Peningkatan produksi dan efisiensi usaha peternakan dan perikanan.3. Pengembangan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.4. Peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan perikanan

6.4.4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

A. Umum

Pembangunan ekonomi memiliki peran yang paling besar dalam pembangunan daerah, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama menyangkut kesempatan kerja dan kesempatan usaha untuk memperoleh pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pembangunan ekonomi terbagi kedalam berbagai sektor, secara garis besar dapat digolongkan ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Bidang perdagangan dan Industri tergolong ke dalam sektor sekunder dan tersier, perkembangan ekonomi dapat dilihat dalam variabel pertumbuhan ekonomi, yakni meningkatnya output barang dan jasa dari tahun sebelumnya yang dihasilkan masyarakat.

Kegiatan ekonomi memiliki keterkaitan satu dengan lainnya (*linkage*). Dengan adanya keterkaitan ini maka akan lahir dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap kegiatan ekonomi dihilirnya maupun di hulunya. Keterkaitan dan dampak ganda ekonomi diharapkan akan lahir kesempatan usaha dan peluang bekerja baru bagi masyarakat.

Kehadiran industri besar di Kabupaten Bekasi diharapkan berdampak ganda terhadap sektor lainnya dan dapat mendorong perkembangan dari sektor industri besar untuk ukuran wilayah kabupaten ternyata terlalu kecil, umumnya hanya sebatas tenaga kerja. Oleh karena itu keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan pada kegiatan usaha kecil dan menengah dan mendorong pembentukan pola kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar dengan membentuk jaringan permodalan, transformasi teknologi produksi dan pemasaran.

B. Permasalahan

Pembangunan ekonomi dewasa ini belum optimal, artinya belum memuaskan masyarakat dan pendapatan belum terdistribusi secara merata diantara anggota masyarakat, dengan demikian kesenjangan masih dirasakan terutama antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan selain pada peningkatan pendapatan per kapita juga distribusinya diantara anggota masyarakat.

Pembangunan ekonomi baik melalui investasi pada industri besar maupun pada industri kecil belum berkembang optimal, oleh karena itu perlu peningkatan pelayanan, promosi investasi dan pemberdayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

C. Matriks Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 6-6. Matriks Bidang Perindustrian dan Perdagangan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan industri yang kompetitif, yang memiliki daya saing baik dalam pasar domestic, ASEAN juga internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.2. Peningkatan kemampuan SDM (pelatihan teknis, manajemen produksi, manajemen koperasi).3. Peningkatan akses permodalan (akses permodalan, penanaman modal).4. Pembinaan kelembagaan (kemitraan usaha).5. Peningkatan kemitraan usaha kecil dan menengah.6. Peningkatan penerapan teknologi UKM7. Pengembangan usaha dalam dan luar negeri untuk peningkatan investor.8. Peningkatan pelayanan dunia usaha.9. Peningkatan akses informasi (informasi bisnis, promosi, pelaporan kegiatan penanaman modal)

6.4.5. Bidang Tenaga Kerja

A. Umum

Salah satu perwujudan visi Kabupaten Bekasi adalah melahirkan manusia unggul, salah satunya tenaga kerja yang berkualitas, terutama golongan penduduk yang berusia 15-55 tahun sebagai angkatan kerja. Pengembangan tenaga kerja yang berkualitas erat kaitannya dengan kompetensi serta tuntutan pasar tenaga kerja baik yang tersedia di Kabupaten Bekasi maupun pasar tenaga kerja nasional, bahkan luar negeri. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja memiliki visi untuk mewujudkan aparatur tenaga kerja yang profesional, efisien, efektif, adaptif dan produktif.

B. Permasalahan

Angkatan kerja Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 tercatat tenaga kerja yang terdaftar sebesar 27.777 orang, sementara lowongan kerja yang tersedia sebanyak 5.273 orang, sementara jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan pada tahun 2002 tercatat sebesar 4.742. Dengan demikian permasalahan utama ketenagakerjaan adalah tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.

C. Matriks Bidang Tenaga Kerja

Tabel 6-7 Matriks Bidang Tenaga Kerja

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Pendayagunaan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, standar upah yang layak, jaminan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat yang ditunjang dengan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan SDM dan pelayanan ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan penempatan dan pengembangan perluasan kerja dengan meningkatkan informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu, Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan SDM pelayanan ketenagakerjaan.2. Pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kelembagaan organisasi pekerja, kesejahteraan pekerja dan organisasi pengusaha3. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

6.4.6. Bidang Kesehatan

A. Umum

Kesehatan masyarakat merupakan asset pembangunan, terutama untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga dapat berkarya dan menghasilkan output yang bernilai ekonomi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, perawat dan obat sebagai bagian tanggung jawabnya dalam membangun kesehatan masyarakat. Namun penyediaan prasarana dan sarana kesehatan tersebut belum menjadi jaminan terbangunnya kesehatan masyarakat tanpa disertai kesadaran masyarakat untuk meminta pelayanan kesehatan.

Sinyalemen tersebut sejalan dengan hasil kajian UNISMA (2000) bahwa Penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi oleh pemerintah relatif memadai, namun tingkat pemanfaatan pelayanan kemungkinan masih rendah. Rendahnya pemanfaatan pelayanan tersebut diantaranya disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, rendahnya daya beli serta pendidikan dan pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dan hampir 45 % penyebab kematian golongan umur 0 -1 adalah berkaitan dengan kualitas gizi masyarakat, berhubungan dengan daya beli, jangkauan pelayanan kesehatan, dan keadaan keluarga itu sendiri. Kualitas gizi masyarakat adalah sangat sensitif dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan makro pembangunan ekonomi wilayah.

Dari uraian di atas dapat terlihat dengan jelas, bahwa tugas dari pemerintah dalam bidang kesehatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan pelayanan tersebut hanya merupakan faktor keharusan (*necessary factor*) dan belum menjadi faktor kecukupan (*Sufficient factor*) dalam membangun kesehatan masyarakat, karena masih terkait dengan variabel lainnya terutama menyangkut pendapatan masyarakat.

B. Permasalahan

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur salah satu variabel kesehatan masyarakat adalah tingkat kematian bayi. Bahkan menjadi salah satu tolok ukur indeks pembangunan manusia. Faktor yang berpengaruh pada angka kematian bayi dapat digolongkan faktor medis dan non medis. Faktor medis dapat diakomodasikan melalui pelayanan kesehatan yang terkait dengan kewenangan bidang kesehatan, sedangkan faktor non medis terkait dengan berbagai bidang lainnya. Disamping angka kematian bayi, terdapat beberapa penyakit yang terkait dengan lingkungan misalnya diare, ISPA, dan gastroenteritis.

Pola penyakit pada golongan 5 - 64 tahun menunjukkan bahwa pernafasan bawah merupakan penyebab utama, kemudian disusul oleh diare, gusi, virus, anemia, pulpa, paru-paru, peneumonia dan disentri. Sepuluh jenis penyakit dari waktu ke waktu relatif sama namun posisi penyakit utama senantiasa berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Pola penyakit pada anak-anak atau golongan umur 1 - 4 tahun menunjukkan bahwa penyebab penyakit secara umum berhubungan dengan organ pernafasan, demam dan masalah gizi. Pola penyakit tersebut sangat sensitif dengan keadaan lingkungan dan daya beli masyarakat.

C. Matriks Bidang Kesehatan

Tabel 6 - 8. Matriks Bidang Kesehatan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan keluarga miskin dan keiompok rawan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 2. Peningkatan Efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 4. Penyehatan lingkungan.

6.4.7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

A. Umum

Pendidikan merupakan salah satu pembangunan yang langsung menyentuh aspek kualitas sumberdaya manusia. Tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi cukup pelik karena terkait dengan berbagai persoalan, terutama besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani dengan jumlah sumberdaya yang terbatas. Namun demikian tugas pelayanan dalam bidang pendidikan harus diupayakan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan dalam memperoleh pendidikan ini, sebagai perwujudan dari misi membentuk manusia pintar dan bener.

Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pola pikir sehingga dapat berkarya produktif (amaliah) yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun perubahan pola pikir perlu dikombinasikan dengan ekspresi budaya, sehingga lebih muncul sebagai manusia yang penuh dengan kearifan budaya.

B. Permasalahan

Pembangunan pendidikan dikabupaten Bekasi masih diliputi oleh berbagai permasalahan, yaitu 1) masih tingginya angka putus sekolah, 2) angka partisipasi murni tingkat SLTP dan SLTA masih rendah, 3) pelayanan pendidikan belum merata, 4) rendahnya kualitas pelayanan, 5) kesejahteraan dan kualitas guru masih terbatas, 6) kelengkapan dan fasilitas sekolah belum memadai, dan 7) pembaharuan kurikulum perlu dikembangkan, terutama muatan lokal. Semua persoalan di atas dilahirkan dari persoalan hulu yakni terbatasnya anggaran.

C. Matriks Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 6-9. Matriks Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan3. Mengembangkan sistem dan manajemen pendidikan.4. Memberdayakan kelembagaan pendidikan menuju kemandirian

6.4.8. Bidang Sosiai

A. Umum

Pembangunan sosial merupakan bagian dari pembangunan regional dan kualitas pembangunan masyarakat secara agregat sangat dipengaruhi oleh kualitas pembangunan pada golongan yang paling rentan atau rawan, yakni golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses berbagai kesempatan kerja dan peluang usaha, yakni masyarakat yang tergolong keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), perempuan dan anak-anak serta karang taruna. Oleh karena itu mereka seharusnya diberdayakan agar memiliki kesetaraan dalam kehidupan (*equality*) dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya (*equity*), untuk meraih kesejahteraan sosial.

B. Permasalahan

Kelompok masyarakat yang tergolong keluarga miskin masih tergolong tinggi yaitu sebesar 36 % yang merupakan kelompok keluarga Pra-KS dan Keluarga Sejahtera I. Disamping itu kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), remaja karang taruna, perempuan dan anak - anak merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kehiduannya meialui pemberdayaan yang harus diiaksanakan secara simultan dan intensif guna menghindari terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

C. Matriks Bidang Sosial

Tabel 6-10. Matriks Bidang Sosial

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil terutama bagi keluarga miskin dan anak terlantar.	Pelayanan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.
Memantapkan penanganan PMKS.	1. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya. 2. Penanggulangan Penyandang masalah kesejahteraan sosial
Mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemberdayaan perempuan dalam usaha kesejahteraan sosial.	1. Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan usaha ekonomi desa. 2. Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

6.4.9. Bidang Penataan Ruang

A. Umum

Tata ruang merupakan wujud perencanaan dalam alokasi sumber daya alam termasuk kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya non-pertanian (permukiman, industri dan kawasan lindung). Kawasan budidaya pertanian perlu mendapat perlindungan agar sesuai dengan fungsinya dan tetap produktif. Begitu pula kawasan budidaya non pertanian perlu dikembangkan agar lebih efisien dalam menunjang kelestarian lingkungan. Berbagai kawasan tersebut perlu diharmoniskan sehingga dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor, perkembangan antar wilayah kecamatan sehingga seluruh perkembangan berlangsung dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten.

Penyusunan kebijakan penataan ruang adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik dengan menampung aspirasi masyarakat, untuk turut serta dalam penataan ruang. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Bentuk peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang Daerah Tingkat II tertuang dalam Pasal 15 PP 69 Tahun 1996 yang uraiannya adalah sebagai berikut :

- a) Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang dicapai;
- b) Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah termasuk perencanaan tata ruang kawasan;
- c) Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
- d) Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- e) Pengajuan keberatan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten;
- f) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- g) Bantuan tenaga ahli.

Dengan mengimplementasikan peraturan tersebut diharapkan lahir kebijakan tata ruang yang harmonis dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan memperdulikan lingkungan adalah perkembangan penggunaan ruang wilayah kabupaten yang mengindahkan atau memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan serta mematuhi kaidah hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam konteks kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi tidak terlepas dengan kegiatan penggunaan tanah. Dalam kebijakan tersebut telah mengarahkan penggunaan ruang sesuai dengan fungsi penggunaannya, agar memberikan dampak pada keharmonisan lingkungan serta tertibnya tata ruang .

Dalam sebidang tanah atau sering disebut lahan terkandung suatu sistem hak penguasaan (*property right systems*), fungsi sosial, ekonomi dan fungsi ekosistem. Untuk itu perlu terpenuhinya tata ruang yang harmonis dan perlu adanya pengendalian pemanfaatan tanah dan penyajian informasi yang akurat bagi masyarakat, terutama menyangkut hak milik dan peruntukannya, agar mencapai ketertiban, baik dalam penggunaan maupun penguasaan hak miliknya.

B. Permasalahan

Perkembangan penduduk Kabupaten Bekasi relatif cepat, hal ini membawa dampak pada kebutuhan ruang terutama kebutuhan lahan untuk kegiatan permukiman dan perubahan penggunaan lahan (*land use*) serta perubahan penutup lahan (*land cover*). Kawasan yang paling sering mengalami perubahan adalah kawasan pertanian menjadi kawasan lainnya. Jika perubahan tersebut diluar rencana tata ruang yang telah ditetapkan maka dimungkinkan akan menimbulkan benturan kepentingan, antara lain benturan kualitas air antara bagian hulu dan hilir sungai, konflik pemanfaatan kawasan lindung dengan budidaya pertanian dan kawasan budidaya pertanian dengan non pertanian.

Selain itu Perkembangan penduduk yang cepat sering menimbulkan implikasi pada penggunaan tanah yang sangat cepat, sehingga pengadministrasian tanah dan penatagunaan tanah jauh kalah cepat dengan perkembangan penggunaan tanah oleh masyarakat. Adanya kesenjangan ini telah menimbulkan benturan administrasi penguasaan dan benturan penggunaan tanah. Jika terus dibiarkan hal ini akan menimbulkan ketidak-serasian tata ruang.

C. Matriks Bidang Penataan Ruang

Tabel 6 - 11.Matriks Bidang Penataan Ruang

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Mendorong dan mengarahkan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.	1. Peningkatan Perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang. 2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
Mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang mengarah pada upaya optimasi ruang dan efisiensi lahan.	1. Peningkatan penataagunaan dan pemanfaatan tanah 2. Pengembangan sistem informasi geografi.

6.4.10. Bidang Permukiman

A. Umum

Dalam bidang ini Kabupaten Bekasi merupakan bagian wilayah yang mengalami perkembangan sangat cepat di Indonesia, khususnya dalam koridor pertumbuhan wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Depok-Bekasi. Perkembangan wilayah permukiman ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, yang besarnya sekitar 6 % per tahun. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Bekasi merupakan salah satu target urban hampir dari seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan penduduk tersebut berdampak luas terhadap penyediaan pelayanan, terutama pelayanan untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Dengan demikian pembangunan perumahan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

B. Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penduduk Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan cepat yang berimplikasi terhadap kebutuhan permukiman. Namun disisi lain harga tanah semakin meningkat, harga bahan bangunan juga mengalami peningkatan karena adanya inflasi, disisi lain daya beli masyarakat tidak mengalami peningkatan secepat peningkatan harga. Oleh karena itu, tantangan yang paling besar adalah penyediaan perumahan yang layak huni namun sesuai dengan daya beli masyarakat.

C. Matriks Bidang Permukiman

Tabel 6 -12. Matriks Bidang Permukiman

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Penyediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan, sesuai dengan tata ruang dan terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan bawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perijinan dan Informasi permukiman. 2. Peningkatan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman. 3. Peningkatan dan pemerliharaan prasarana dan sarana pertamanan, pemakaman serta PJU.

6.4.11. Bidang Pekerjaan Umum

A. Umum

Bidang kewenangan pekerjaan umum didalamnya meliputi kecipta-karyaan, kebina-
margaan dan pengairan. Penyediaan sarana dan Prasarana dibidang pekerjaan umum merupakan layanan dasar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan perekonomian berkaitan dengan mobilitas orang, barang dan jasa.

Sarana dan prasarana yang memadai baik aspek kualitas maupun kuantitas dapat memberikan kontribusi pada daya saing hasil perekonomian Kabupaten Bekasi. Begitu juga prasarana dan sarana bangunan sebagai tempat pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran pelayanan, khususnya kegiatan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya.

B. Permasalahan

Prasarana wilayah, khususnya jalan, jembatan, saluran irigasi dan saluran pembuang serta bangunan memiliki umur teknis yang terbatas, karena mengalami penyusutan. Untuk menjaga fungsinya dalam pelayanan memerlukan pembangunan, peningkatan atau pemeliharaan yang intensif sehingga memiliki umur teknis relatif panjang.

Kondisi dan kuantitas prasarana tidak merata untuk seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, beban penggunaan dan jumlah masyarakat yang menggunakannya. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, terutama pelayanan di bagian Utara Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu bidang pekerjaan umum ditantang untuk memberikan pelayanan yang optimal melalui penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang memadai.

C. Matriks Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 6 – 13. Matriks Bidang Pekerjaan Umum

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Penyediaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan prasarana dan sarana publik serta layanan dasar masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengelolaan Bangunan Negara dan Umum. 2. Peningkatan perencanaan, pengembangan, pembangunan jalan, jembatan serta prasarana pengairan. 3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian serta pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan, jalan, jembatan dan prasarana pengairan. 4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan dan pasar. 5. Peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana pemadam kebakaran

6.4.12. Bidang Perhubungan

A. Umum

Bidang perhubungan berperan dalam pergerakan barang dan orang antar kota dan wilayah baik dalam Kabupaten Bekasi maupun dengan wilayah lainnya. Perhubungan di Kabupaten Bekasi memegang peranan penting, karena banyak wilayah terutama bagian Utara yang belum terlayani transportasi dengan memuaskan. Untuk itu pengembangan perhubungan memegang peranan vital dalam pembangunan wilayah Kabupaten Bekasi.

B. Permasalahan

Layanan perhubungan antar pusat pertumbuhan terutama pusat Wilayah Kabupaten dengan wilayah lainnya belum memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat, yang disebabkan belum memadainya prasarana jalan maupun pengembangan roda transportasinya. Untuk itu perlu pengembangan sistem transportasi agar memberikan layanan perhubungan yang efisien dan efektif.

C. Matriks Bidang Perhubungan

Tabel 6 - 14. Matriks Bidang Perhubungan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Menciptakan pergerakan orang dan barang yang aman, lancar dan tertib melalui penciptaan sistem perhubungan antar wilayah dan sarana dan prasarana yang memadai	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana perhubungan. 2. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian sarana transportasi.

6.4.13. Bidang Lingkungan Hidup

A. Umum

Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan adalah dua agenda yang harus berjalan seirama dan saling mengisi. Pembangunan yang menitikberatkan pada ekonomi akan berimplikasi luas penurunan kualitas lingkungan, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat (social welfare). Begitu juga jika terlalu mengarah pada kelestarian lingkungan akan menekan perkembangan ekonomi, yang pada gilirannya akan berdampak pada terbatasnya lapangan pekerjaan dan sumber-sumber pendapatan masyarakat.

Keseimbangan kedua pembangunan ini telah diarahkan oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang diarahkan pada perubahan yang terencana menuju pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Penggunaan sumberdaya alam yang efisien, yang diindikasikan oleh rendahnya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam.
- c. Alokasi sumberdaya berkeadilan (*equity*) baik antar generasi, maupun antar kelompok masyarakat.

Prinsip dan arah perubahan tersebut berimplikasi luas terhadap ruang lingkup kerja yang harus diemban dalam bidang lingkungan hidup.

B. Permasalahan

Kabupaten Bekasi memiliki konfigurasi ruang cukup unik. Konfigurasi yang dimaksud adalah pusat industri terletak di bagian tengah wilayah kabupaten, sedangkan limbahnya dibuang ke perairan yang mengalir ke wilayah utara, sedangkan wilayah utara adalah sebagai pusat pengembangan pertanian dan perikanan. Untuk itu pengembangan industri baik secara langsung maupun tak langsung akan berimplikasi pada risiko yang timbul pada sektor pertanian dan perikanan kelautan.

Permasalahan tersebut membawa implikasi luas sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan serta regulasi yang tepat agar dapat memberikan kesempatan kepada sektor lain dan masyarakat yang berada di wilayah hilir industri untuk berkembang secara optimal.

C. Matriks Bidang Lingkungan Hidup

Tabel 6 –15. Matriks Bidang Lingkungan Hidup

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan lingkungan yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai serta tersedianya regulasi sebagai dasar dalam pengendalian dampak lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengendalian dampak lingkungan. 2. Pengawasan, pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan. 3. Pengendalian dan pemanfaatan air bawah tanah, galian C dan pertambangan.

6.4.14. Bidang Kependudukan

A. Umum

Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan sensus penduduk Tahun 2002 adalah berjumlah 1.727.066 jiwa. Terdiri dari 864.511 orang laki-laki dan 862.555 Berdasarkan model struktur umurnya, Kabupaten Bekasi tergolong wilayah yang akan mengalami perkembangan sangat pesat, karena didominasi oleh struktur umur muda, yakni penduduk golongan umur 0-35 tahun proporsinya sekitar 50 % dari penduduk Kabupaten Bekasi. Dengan demikian jumlah penduduk tersebut akan berimplikasi pada permintaan pelayanan, terutama pendidikan dan kesehatan serta administrasi kependudukan.

Penduduk Kabupaten pada tahun 2000 menyebar tidak merata, konsentrasi yang paling besar terletak di kecamatan Tambun Selatan sebanyak (16,20 %) dan terkecil terletak di kecamatan Bojong Mangu sebanyak 1,3 %.

B. Permasalahan

Penduduk persebarannya tidak merata dan pertumbuhan penduduk relatif tinggi terutama angka migrasi, untuk itu membutuhkan pelayanan administratif yang efisien dan akurat.

C. Matriks Bidang Kependudukan

Tabel 6 –16. Matriks Bidang Kependudukan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Pengembangan pelayanan administratif kependudukan, monitoring dan kerja sama dengan berbagai pihak	1. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 2. Pelayanan informasi kependudukan

6.4.15. Bidang Pariwisata

A. Umum

Pembangunan bidang pariwisata memiliki potensi cukup besar dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bekasi, oleh karena itu perlu dikembangkan secara optimal. Disamping memberikan manfaat langsung berupa nilai ekonomi dari jasa asset pariwisata, juga berperan dalam mendorong sektor lainnya melalui dampak ganda yang berkaitan antara sektor pariwisata dengan sektor lainnya. Keterkaitan dan dampak ganda tersebut diharapkan akan menciptakan kesempatan berusaha dan peluang bekerja baru bagi masyarakat. Kondisi ini diharapkan berdampak positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian wilayah.

B. Permasalahan

Pembangunan sektor pariwisata dewasa ini belum optimal dan belum memuaskan masyarakat baik produsen jasa wisata maupun konsumennya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor determinan, antara lain objek pariwisata yang belum memungkinkan dipasarkan dan kurangnya promosi untuk investor dalam berinvestasi di Kabupaten Bekasi serta prasarana yang belum memadai.

namun tak kalah penting adalah pilihan keinginan (preferensi) untuk mengunjungi objek pariwisata yang berada di Kabupaten Bekasi masih terbatas.

C. Matriks Bidang Pariwisata

Tabel 6-17 Matriks Bidang Pariwisata

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
Kebijakan	Program
Pembangunan industri pariwisata yang kompetitif dan objek pariwisata yang atraktif serta pemasaran yang profesional guna memenuhi permintaan jasa kepariwisataan yang terus mengalami perkembangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pelaksanaan seni dan budaya2. Peningkatan Promosi kepariwisataan3. Pengembangan dan penataan utilitas pariwisata

Tabel 6 - 18
Matrik Rencana Strategis dalam Dimensi Bidang Pemerintahan

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 1 Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pintar, dan bener	A. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan pelayanan agar mencapai manusia yang, sehat, terampil, cerdas, dan berakhlak mulia	1) Terwujudnya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia/berbudi luhur	Pendidikan	Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan 2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan 3. Mengembangkan sistem dan manajemen pendidikan 4. Memberdayakan kelembagaan pendidikan menuju kemandirian
		2) Terwujudnya masyarakat yang sehat	Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan keluarga miskin dan kelompok rawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat 2. Peningkatan Efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 4. Penyehatan lingkungan
	B. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan permintaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya masyarakat yang terampil dan kompeten dalam berbagai bidang ketenagakerjaan. 2) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif, berdaya saing dan mandiri dengan tingkat pendidikan yang memadai. 3) Terwujudnya perlindungan bagi tenaga kerja 	Tenaga kerja	Pendayagunaan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, standar upah yang layak, jaminan kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan penempatan dan pengembangan perluasan kerja dengan meningkatkan informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu, Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan SDM pelayanan ketenagakerjaan.

				<p>pekerja, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat yang ditunjang dengan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan SDM dan pelayanan ketenagakerjaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan penempatan dan pengembangan perluasan kerja dengan meningkatkan informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu, Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan SDM pelayanan ketenagakerjaan. 3. Pembinaan hubungan industrial, persyaratan kerja, kelembagaan organisasi pekerja, kesejahteraan pekerja dan organisasi pengusaha. 4. Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
--	--	--	--	--	--

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 2 Meningkatkan profesionalitas institusi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan efisien	Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;	Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi Lembaga Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan 2. Peningkatan pelaksanaan kewenangan daerah dan kerjasama antar daerah 3. Pelaksanaan koordinasi lembaga perangkat daerah dan DPRD, instansi vertikal dan pemerintah lebih atas 4. Pembinaan Perangkat Daerah dan fasilitasi sarana prasarana Kecamatan
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kehumasan 2. Pengembangan Komunikasi dan Media Massa
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan prasarana dan sarana perekonomian untuk mewujudkan perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) 2. Peningkatan prasarana dan sarana perekonomian masyarakat 3. Peningkatan pengembangan usaha daerah melalui BUMD
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pelayanan administrasi pembangunan yang tertib dan transparan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

					3. Program Pengoptimalisasian Pengendalian, Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari APBD, APBD Propinsi, APBN dan BIN
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan dan mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan	1. Pembangunan kewilayahan Kecamatan 2. Pelayanan Masyarakat pada tingkat Kecamatan
			Administrasi Umum Pemerintahan	Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan	Pelayanan Masyarakat pada tingkat desa/kelurahan
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan pelayanan kehidupan beragama dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	1. Pembinaan dan Peningkatan koordinasi Kesejahteraan Sosial 2. Pembinaan dan peningkatan kualitas keagamaan 3. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama
			Kependudukan	Pengembangan pelayanan administratif kependudukan, monitoring dan kerja sama dengan berbagai pihak	1. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 2. Pelayanan informasi kependudukan
		2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan umum	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengelolaan dan pemeliharaan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam pembangunan daerah	1. Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah 2. Pengelolaan Perlengkapan Pemerintah Daerah
			Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan penyelenggaraan kegiatan umum untuk memberikan dukungan pelayanan prima	Pengelolaan Rumah Tangga Pemerintah daerah

		3) Meningkatnya pengawasan dan tindak lanjut pengawasan;	Administrasi Umum Pemerintahan	Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan aparatur yang bersih dan bertanggung jawab	Pemeriksaan Regular dan Non Regular
	B. Mewujudkan kemandirian dan keunggulan daya saing daerah	1) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Administrasi Umum Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas kinerja pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan kemampuan Pengelolaan Keuangan daerah
		2) Meningkatnya peran dan fungsi perangkat daerah	Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatkan kualitas aparat pemerintah desa dan kinerja kelembagaan desa untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa	1. Pembinaan Pemerintahan desa 2. Pengelolaan Asset Desa
			Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatkan Penataan Kelembagaan dalam rangka meningkatkan Pelayanan Prima yang mendukung Kinerja Instansi	Pembentukan dan Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
		3) Meningkatnya pengembangan potensi daerah.	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Operasional Peningkatan pendapatan
	C. Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien	Terakomodirnya seluruh kepentingan pembangunan dan tidak ada tumpang tindihnya kegiatan pembangunan	Administrasi Umum Pemerintahan	Penyelenggaraan dan pengoptimalisasian perencanaan di segala bidang	1. Program Pengoptimalisasian Dokumen Perencanaan 2. Program Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah Swasta 3. Program Pelaksanaan Tertib Sistem Perencanaan

	D. Mengembangkan akses informasi di bidang dunia usaha, pelayanan publik dan sektor-sektor lainnya	Penggunaan Teknologi Informasi untuk pelayanan masyarakat dan administrasi	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan sistem informasi pembangunan, kearsipan dan perpustakaan dalam rangka pemberian pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan 2. Peningkatan pengelolaan jaringan dan sistem informasi pemerintah daerah
	E. Memantapkan sistem evaluasi kinerja dan jenjang karir aparatur untuk membina kualitas, produktivitas dan responsibilitas untuk perbaikan kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparat	Meningkatnya kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;	Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatkan kualitas PNS dan pelayanan administrasi kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan administrasi kepegawaian 2. Peningkatan pembinaan karier dan prestasi kerja PNS 3. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
	F. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan.	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan dan pelayanan tata laksana kegiatan DPRD	Pelaksanaan dan Pengembangan Tata Laksana Rumah Tangga DPRD

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 3 Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis	A. Menciptakan rasa setia kawan dan partisipatif dalam sosial politik namun santun, demokratis, berbudaya, aman dan tertib.	1) Terbinanya partisipasi masyarakat, khususnya dibidang Kamtibmas;	Administrasi Umum Pemerintahan	Meningkatkan ketertiban masyarakat dan taat hukum	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis dan terbangunnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;	Administrasi Umum Pemerintahan	Menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan bangsa.	Terciptanya lingkungan masyarakat plural yang kondusif
		3) Terwujudnya kehidupan berpolitik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Administrasi Umum Pemerintahan	Mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi	Pengembangan kearifan budaya berpolitik
		4) Terwujudnya kesejahteraan bagi keluarga miskin, anak terlantar, anak yatim, lanjut usia dan penyandang cacat;	Sosial	Menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas azas kemanusiaan yang adil terutama bagi keluarga miskin dan anak terlantar	Pelayanan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.

		5) Tertanggulangnya masalah pasca bencana alam, layanan sosial bagi tindak kekerasan dan pengungsi;		Memantapkan penanganan PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya. 2. Penanggulangan Penyandang masalah kesejahteraan sosial
		6) Terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana, anak jalanan, WTS, dan pengidap Narkoba;		Mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemberdayaan perempuan dalam usaha kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan usaha ekonomi desa.
		7. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 4 Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan	A. Meningkatkan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk menghasilkan produk pertanian	Terwujudnya peningkatan usaha pertanian rakyat yang berbasis agribisnis	Pertanian	Pembangunan pertanian berbasis agribisnis melalui kerjasama kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan 2. Peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani dan pengembangan pola kemitraan 3. Pengembangan komoditas tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan 4. Peningkatan prasarana dan sarana pertanian 5. Pengembangan kelestarian sumber daya alam perkebunan dan kehutanan.
	B. Meningkatkan kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk menghasilkan produk peternakan, perikanan dan kelautan	Peningkatan kemampuan nelayan dan pembudidayaan ikan untuk menghasilkan peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya	Kelautan dan Perikanan	Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan diarahkan pada pendekatan peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya melalui peningkatan pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sumber daya ternak, laut, dan pesisir 2. Peningkatan produksi dan efisiensi usaha peternakan dan perikanan 3. Pengembangan pemasaran hasil peternakan dan perikanan 4. Peningkatan prasarana dan sarana peternakan dan perikanan

	C. Meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah (UKM) dan operasi untuk mengakses permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi untuk kerajinan rakyat dan industri kecil	1) Kemampuan pengelolaan usaha kecil dan menengah, masyarakat, industri rumah tangga dan aneka jasa	Perindustrian dan Perdagangan	Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangunan industri yang kompetitif, yang memiliki daya saing baik dalam pasar domestik, ASEAN juga internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. 2. Peningkatan kemampuan SDM (pelatihan teknis, manajemen produksi, manajemen koperasi). 			
		2) Meningkatnya jumlah masyarakat luas yang menjadi pelaku usaha produksi / pengolahan, perdagangan dan aneka jasa				<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan akses permodalan (akses permodalan, penanaman modal) 		
	D. Meningkatkan daya saing produk daerah dan produktivitas dunia usaha serta sektor lainnya untuk meningkatkan minat investasi	1) Berkembangnya keterkaitan dan kemitraan usaha UKMK dengan pengusaha besar.						<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan kelembagaan (kemitraan usaha) 5. Peningkatan kemitraan usaha kecil dan menengah
		2) Meningkatnya akses terhadap teknologi, informasi, dan SDM dari setiap UKM.						<ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan penerapan teknologi UKM
	E. Meningkatnya kemampuan industri besar untuk terus berkembang melalui peningkatan kapasitas dan investasi baru	Tersedianya informasi peluang investasi yang cepat dan akurat dan prosedur perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan memiliki kepastian						<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengembangan usaha dalam dan luar negeri untuk peningkatan investor 8. Peningkatan pelayanan dunia usaha 9. Peningkatan akses informasi (informasi bisnis, promosi, pelaporan kegiatan penanaman modal)

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 5 Meningkatkan supremasi hukum dan ketertiban	Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat	1) Tersedianya peraturan-peraturan hukum yang mendukung terhadap semua aktifitas masyarakat;	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengembangan dan mewujudkan produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Pengkajian produk hukum daerah
		2) Terwujudnya kepastian hukum bagi anggota masyarakat			2. Pembinaan dan bantuan hukum
		3) Tersosialisasinya produk hukum kepada masyarakat secara tepat, cepat dan akurat;			3. Penyusunan produk hukum daerah dan pendokumentasian hukum
		4) Terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat pada peraturan-peraturan hukum;			4. Terciptanya pembinaan penerapan penegakan hukum

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 6 Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu	A. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan / permukiman	Meningkatnya penyediaan layanan prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang memadai dan memenuhi standar	Permukiman	Penyediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan, sesuai dengan tata ruang dan terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan bawah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perijinan dan Informasi permukiman 2. Peningkatan perencanaan, pengawasan pengendalian dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman 3. Peningkatan dan pemerliharaan prasarana dan sarana pertamanan, pemakaman serta PJU
	B. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana serta layanan dasar masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan yang sesuai dengan standar bangunan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang merata baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan	Pekerjaan Umum	Penyediaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan prasarana dan sarana publik serta layanan dasar masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengelolaan Banngunan Negara dan Umum 2. Peningkatan perencanaan, pengembangan pembangunan jalan, jembatan serta prasarana pengairan 3. Peningkatan Pengawasan dan Pengembangan serta pemeliharaan prasarana dan sarana bangunan, jalan, jembatan dan prasarana pengairan 4. Peningkatan dan pemeliharaan prasana & sarana kebersihan dan pasar

					5. Peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
	C. Meningkatkan mobilitas dan hubungan antar wilayah dengan aman, tertib dan lancar	Pengembangan sistem manajemen transportasi dan peningkatan sarana perhubungan	Perhubungan	Menciptakan pergerakan orang dan barang yang aman, lancar dan tertib melalui penciptaan sistem perhubungan antar wilayah dan sarana dan prasarana yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana perhubungan 2. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian sarana transportasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Bidang Pemerintahan	Strategi mencapai tujuan dan sasaran	
				Kebijakan	Program
Misi 7 Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan	A. Meningkatkan tata ruang yang partisipatif, terpadu, serasi, selaras dan seimbang serta berdayaguna	Tersusunnya rencana tata ruang wilayah dan kawasan tertentu/khusus sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang	Penataan Ruang	Mendorong dan mengarahkan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang 2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
	B. Mewujudkan ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terwujudnya ketertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah		Mengimplementasikan kebijakan tata ruang yang mengarah pada upaya optimasi ruang dan efisiensi lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penataagunaan dan pemanfaatan tanah 2. Pengembangan sistem informasi geografi
	C. Menciptakan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta terkendali nya kualitas sumber daya alam	Terkendalnya kerusakan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat memelihara fungsi dan kualitas sumber daya alam	Lingkungan Hidup	Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan lingkungan yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai serta tersedianya regulasi sebagai dasar dalam pengendalian dampak lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengendalian dampak lingkungan 2. Pengawasan, pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan 3. Pengendalian dan pemanfaatan air bawah tanah, galian C dan pertambangan

	D. Sumberdaya alam dan lingkungan serta seni budaya dalam pariwisata	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan yang potensial untuk dijadikan objek wisata alam dan mewujudkan seni dan benda sejarah lainnya sebagai objek wisata	Pariwisata	Pembangunan industri pariwisata yang kompetitif dan objek pariwisata yang atraktif serta pemasaran yang profesional guna memenuhi permintaan jasa kepariwisataan yang terus mengalami perkembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelaksanaan seni dan budaya 2. Peningkatan Promosi kepariwisataan 3. Pengembangan dan penataan utilitas pariwisata
--	--	---	------------	--	---

6.5. Indikator Sasaran Strategis (Makro)

Berdasarkan evaluasi indikator makro, terdapat misi yang tidak terwakili indikatornya, yakni misi keenam *Mengembangkan sarana dan prasarana publik secara terpadu*. Dilain pihak Indikator Renstra 2002-2004 terlalu kaku dan sebagian tidak memberikan informasi terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan Renstra Bupati mengusulkan indikator strategisnya, namun masih ada yang belum terwakili, terutama mengenai masalah lingkungan. Indikator yang akan digunakan adalah indikator usulan bupati yang ditambah dengan indikator lainnya. Informasi yang dapat dipahami dari indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

6.5.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan dengan titik sentral "manusia", pada dasawarsa terakhir ini muncul sebagai salah satu tuntutan yang global. Di Indonesia tuntutan tersebut mulai muncul dan menjadi prioritas perhatian pada awal Repelita VI melalui penetapan strategi pembangunan nasional dengan penekanan pada **"pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan peningkatan sumber daya manusia"**. Dalam kerangka ini pembangunan manusia seutuhnya menjadi tujuan utama pembangunan nasional, melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu berperan sebagai subyek pembangunan. Tuntutan pembangunan manusia tersebut cenderung akan semakin berkembang menjadi kebutuhan untuk diantisipasi, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia dan terbentuknya komunikasi menjelang maupun pada saat kita memasuki era globalisasi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tuntutan pembangunan manusia tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk pernyataan politik (*political statement*) saja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun harus mampu dijabarkan dalam program-program yang nyata. Untuk sampai pada proses tersebut sudah barang tentu diperlukan pengukuran-pengukuran terhadap **"pembangunan manusia"** itu sendiri, yang justru selama ini menjadi kendala perencanaan di daerah.

Dalam mengantisipasi kendala pengukuran semacam ini, maka dengan munculnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia), telah membuka wawasan kita untuk pengembangan dan pemanfaatannya lebih lanjut dalam proses perencanaan.

Secara konsep, pembangunan manusia yang diajukan oleh UNDP maknanya melihat keterlibatan partisipasi aktif penduduk dalam pembangunan sejak perumusan, penentuan kebijakan hingga evaluasi, sehingga disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada penduduk (*people centered development*) : oleh, dari dan untuk penduduk. Selain IPM,

pengukuran lainnya adalah Indeks Kebebasan Manusia (Human Freedom Indeks / HFI). IPM mempunyai tiga komponen utama yakni:

1) Angka kematian Bayi

Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan tingkat kematian bayi per seribu kelahiran hidup. Angka ini dipengaruhi oleh : persentase penolong persalinan oleh tenaga medis rendah, pemeriksaan antenatal dan status gizi ibu hamil, kemiskinan dan pendidikan.

2) Angka Harapan Hidup, yang diukur dari harapan hidup sejak lahir. Panjang usia, secara konseptual merupakan Indikator Komposit dari antara lain aspek kesehatan dan gizi yang memadai, khususnya pada ibu dan anak.

3) Angka Melek Huruf diukur dari tingkat melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama bersekolah. Tingkat pengetahuan membantu orang meningkatkan potensi mereka sehingga berusaha memanfaatkan berbagai peluang yang ada.

4) Daya Beli. Daya beli atau Penghasilan sebagai hasil dari kegiatan ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat akan membuka peluang untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhannya bahkan memuaskan segala keinginannya (*preferensinya*).

6.5.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto adalah alat untuk mengukur kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator strategis bagi penyelenggaraan pemerintah dalam rangka stabilitas dan rehabilitas kondisi sosial - ekonomi maupun sosial - politik. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

6.5.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi UMKM

Laju Pertumbuhan Ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi 9 lapangan usaha yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Energi, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya serta Jasa-Jasa. Dengan LPE UMKM ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai trend/perkembangan dari masing-masing kelompok lapangan usaha berdasarkan kriteria skala kecil, menengah dan besar.

6.5.4. PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah. Pendapatan per kapita mencerminkan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor - faktor produksi yang ada disuatu wilayah setelah dibagi dengan jumlah penduduk yang ada diwilayah tersebut.

6.5.5. Pertumbuhan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mencari sumber-sumber keuangannya sendiri, sebagai modal dasar daerah dalam melakukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi sumber-sumber sebagai berikut:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dengan demikian Rasio PAD terhadap APBD menggambarkan alokasi dana dengan kemampuan pendanaannya sendiri.

6.5.6. Infrastruktur

a. Panjang Jalan Kabupaten Beraspal

Jalan beraspal mewakili keberadaan dan fungsi infrastruktur wilayah. Hal ini menjelaskan berbagai informasi terutama menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat dan dunia usaha, terutama layanan pergerakan barang, orang dan jasa antar wilayah. Prasarana jalan yang lancar dapat mendorong investasi dan produktivitas wilayah dan memperlancarar untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan.

b. Lahan Irigasi Teknis

Lahan irigasi teknis merupakan prasarana wilayah yang sangat penting bagi kegiatan pertanian. Dengan berfungsinya lahan irigasi teknis memberikan informasi penting tentang tersedianya prasarana untuk sumberdaya air bagi kegiatan produksi pertanian.

6.5.7. Kualitas Lingkungan

Parameter kualitas lingkungan merupakan wakil dari parameter pembangunan berkelanjutan, yakni pendekatan yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan lingkungan, sebagai dua agenda yang harus harmonis dan berjalan bersama.

a. Kualitas Air

Berdasarkan pendekatan pemahaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Parameter yang digunakan untuk menggambarkan kualitas air adalah fisika, kimia, biologis. Sedangkan batas kadar dari parameter ini disebut dengan Baku Mutu.

Parameter air sungai yang paling banyak digunakan adalah angka BOD, COD dan pH. BOD adalah Jumlah Oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi secara biologis. BOD (*Biological Oxygen Demand*) ini mencerminkan jumlah bahan organik yang berada dalam perairan, semakin besar nilainya maka semakin banyak bahan organik yang berada dalam perairan.

COD (*Chemical Oxygen Demand*) kebutuhan oksigen secara kimia, hal ini memberikan informasi tentang jumlah bahan organik dan anorganik yang dapat dioksidasi secara kimia. Angka COD Harus lebih tinggi dari BOD karena angka tersebut sudah termasuk angka BOD.

Keasaman air (pH air) memberikan gambaran tentang derajat keasaman air yang dapat mempengaruhi kehidupan biota air serta produktivitasnya. pH air normal adalah berkisar antara 6-9.

Persen BOD, pH atau COD terhadap Baku Mutu (% COD-BM) adalah memberikan informasi tentang target mengurangi bahan pencemar dalam perairan dengan berpatokan pada Baku Mutu yang diberlakukan pada sungai tersebut.

b. Kualitas udara

Parameter yang sering digunakan untuk menggambarkan kualitas udara adalah Carbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Dioksida (SO₂), NH₃, H₂S, Hidrokarbon, Timbal dan kebisingan. Dari parameter tersebut dapat diambil beberapa parameter tertentu antara lain SO_x dan Timbal.

SOx menggambarkan polusi oleh bahan sulfur, bahan tersebut dalam udara akan bercampur dengan air dan akan menjadi asam sulfat, sehingga memberikan kontribusi pada sifat hujan asam. Sedangkan unsur timbal merupakan unsur yang dapat mengganggu kecerdasan anak. Persen SOx dan Timbal (Pb) terhadap Baku Mutu (% Pb, Sox - BM) adalah target pengelolaan kualitas udara terhadap baku mutu yang berlaku. Hubungan berbagai variabel pembangunan dapat dilihat dalam Gambar 6-2.

6.5.8. Jumlah Orang Miskin (Ratio Angka Kemiskinan)

Masyarakat yang tergolong miskin adalah kelompok masyarakat marjinal yang rentan dengan berbagai permasalahan sosial, disamping itu menjadi indikator kunci dalam evaluasi pembangunan ekonomi. Semakin berkurang angka kemiskinan menunjukkan adanya kemampuan memperbaiki keadaan ekonomi yang sangat vital dalam pembangunan yang semakin meningkat.

Kemiskinan tidak dapat dihindari karena sebagai dampak pembangunan pendekatan mekanisme pasar. Hal ini secara teoritis dapat dijelaskan oleh teori Kausasi Kumulatif, yang menyatakan bahwa Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif di banding daerah-daerah lainnya. Oleh Myrdal (1957) disebut sebagai *backwash effect*. Dengan demikian masalah kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun hanya dapat dikurangi jumlahnya.

6.5.9. Prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi

Dari hasil pendataan keluarga di kabupaten Bekasi, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Keluarga Pra Sejahtera
- b. Keluarga sejahtera I
- c. Keluarga Sejahtera II
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. eluarga Sejahtera III +

Pengelompokan ini dilakukan dengan menggunakan 5 indikator yaitu penilaian yang terdiri dari variabel agama, pangan, sandang, pendidikan, dan lantai. Variabel agama dilihat dari kewajiban menjalankan syariat Agama. Variabel pangan dilihat dari kemampuan makan 2 X sehari. Variabel sandang dilihat dari kemampuan mempunyai pakaian ganti sedangkan variabel pendidikan dilihat dari kemampuan baca tulis latin dan variabel lantai dilihat dari sebagian besar lantai bukan tanah.

Dengan adanya pengelompokan ini dapat kita simpulkan bahwa :

- a. Yang termasuk keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
- b. Yang termasuk keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan Sosial Psikologinya.
- c. Yang termasuk Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya.
- d. Yang termasuk Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, kebutuhan sosial psikologisnya dan keseluruhan kebutuhan perkembangannya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.
- e. Yang termasuk Keluarga Sejahtera III + adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, kebutuhan sosial psikologisnya dan keseluruhan perkembangannya serta dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui keluarga kemiskinan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan indikator tersebut diatas kita dapat mengasumsikan bahwa keluarga pra sejahtera karena alasan ekonomi dapat kita kategorikan sebagai keluarga Miskin Sekali sedangkan keluarga sejahtetra I karena alasan ekonomi dapat kita kategorikan sebagai keluarga Miskin.

6.5.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) tenaga kerja yang sepenuhnya menganggur. Tingkat pengangguran terbuka adalah besarnya persentase pengangguran terbuka dalam satu tahun. Hal ini memberikan informasi tentang kebijakan pembangunan ekonomi yang harus berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja di wilayahnya.

Tabel 6 – 19. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis

No	Variabel Strategis	Indikator Sasaran Strategis					
		Data dasar 2002	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Manusia							
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,73	72,53	73,61	74,71	75,67	76,54
	a. Angka Kematian Bayi / seribu kelahiran Hidup	55	48,3	47,7	46,4	45,6	44,4
	b. Angka Harapan Hidup (tahun)	68,0	69,5	70	70,5	71	71,5
	c. Angka Melek Huruf (%)	88,50	94	96	98	98,5	99
	d. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,15	7,6	7,8	8,1	8,4	8,6
	e. Daya Beli (dalam ribu)	582	650	700	735	775	810
Bidang Ekonomi							
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,60	5,92	6,37	7,06	7,70	7,82
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) UMKM (%)						
	a. Usaha Kecil	4,49	5,88	6,18	6,56	7,00	7,55
	b. Usaha Menengah	4,83	6,87	7,11	7,49	8,12	8,82
	c. Usaha Besar	4,58	5,73	6,48	7,13	7,88	8,51
4	PDRB per Kapita (harga berlaku) (Rp./kapita)	20.141.070	21,784,920	21.954.783	22,214,254	22,450,335	22.682.237
5	Pertumbuhan PAD (% per tahun) (termasuk potensi DPLL)	106.087.945.547,30	111.944.000.141,51 (5,52%)	119.074.832.950,53 (6,37%)	127.493.423.640,13 (7,07%)	137.310.417.260,42 (7,7%)	148.048.091.890,18 (7,82%)

No	Variabel Strategis	Indikator Sasaran Strategis					
		Data dasar 2002	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Manusia							
6	Infrastruktur :						
	a. Panjang jalan Kabupaten (ashpalted) (KM dari jalan Kabupaten)	634,32	663,50	683,50	693,50	703,50	718,50
	b. Lahan Irigasi Teknis (Ha)	48.906	48.906	48.906	48.906	48.207	48.207
Lingkungan Hidup							
7	Kualitas Lingkungan Air sungai						
	BOD (mg/l)	133,88	124,50	111,1	97,73	84,34	70,95
	COD (mg/l)	360,42	335,19	299,13	263,13	227,06	191,02
	PH (terhadap Baku Mutu)	7,5	(6 – 9)	(6 – 9)	(6 – 9)	(6 – 9)	(6 – 9)
	Udara (%)						
	SO2	37,38	< 265	< 265	< 265	< 265	< 265
	Pb (terhadap Baku Mutu)	0,13	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5
Bidang Sosial							
8	Ratio Angka Kemiskinan (%)	8,46	6,0	5,4	5,0	4,7	4,5
9	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Alasan Ekonomi (%)	36	31	29	28	27	26
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,35	6,0	5,4	5,0	4,7	4,5

BAB VII

EVALUASI KINERJA

7.1. Umum

Bagian penting dalam pengelolaan kegiatan adalah evaluasi yang mantap atas pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana kegiatan dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat, melalui penetapan indikator kinerja.

7.2. Indikator dan Standar Kinerja

Dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan murah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak menimbulkan biaya berlebihan.

7.3. Kerangka Pengukuran Kinerja

1. Penetapan Indikator Kinerja

- a. Masukan (input)
- b. Keluaran (output)
- c. Hasil (outcome)
- d. Manfaat (benefit)
- e. Dampak (impact)

2. Penetapan Capaian Kinerja

Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

3. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN :

INSTANSI :

FORMULIR PKK

Program	Uraian	Kegiatan				Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8

Rumus - rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja, yaitu :

- i. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka semakin untuk menghitung capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ii. Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- iii. Nilai capaian indikator Kinerja :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot})}{100\%}$$

7.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN :

INSTANSI :

FORMULIR PPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (target)	Realisasi	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

7.5. Analisis Pencapaian Akuntabilitas Kinerja

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini, perlu pula dijelaskan proses pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis input-output, analisis realisasi outcome dan benefit, analisis impact, baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan, dan analisis kebijakan.

Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dengan realisasi, seperti:

- 1) Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan.
- 2) Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul dibidangnya atau dengan sektor swasta.

Bagi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu pula ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa pelayanan pemerintah, dengan memperhatikan standar pelayanan yang harus diberikan dengan kendala-kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan masyarakat pelanggan.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu unit kerja perlu digunakan indikator-indikator ekonomi, sosial atau indikator lainnya yang bersifat nasional, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per Kapita, tingkat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, tingkat kematian bayi dan balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat kesehatan gizi masyarakat, dan tingkat usia harapan hidup dan sebagainya.

Penilaian kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator, masukan, keluaran, hasil dampak dan manfaat, akan melengkapi Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang terdiri atas :

- 1) Laporan perhitungan APBD
- 2) Nota perhitungan APBD
- 3) Laporan Aliran Kas
- 4) Neraca Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Bekasi 2005-2009 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada Visi Misi, Poldas dan Propeda Kabupaten Bekasi serta komitmen Bupati dalam membangun Bekasi.

Dokumen Renstra menggambarkan secara komprehensif tentang arah dan gambaran masa depan Kabupaten Bekasi yang ingin diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang akan dilakukan dalam jangka waktu 2005-2009. Dalam dokumen Renstra memuat 20 (Dua Puluh) tujuan, 40 (Empat puluh) sasaran, 39 (tiga puluh sembilan) kebijakan dan 99 (sembilan puluh sembilan) program pembangunan. Semua itu dikelompokkan dalam 15 (lima belas) bidang pemerintahan yang mencakup Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perindustian dan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Penataan Ruang, Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Bidang Kepariwisata serta Bidang Sosial. Kelimabelas bidang pemerintahan tersebut masing-masing memiliki kebijakan dan program yang jelas dan rasional, hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan, terarah dan berkesinambungan serta dapat menghadapi tantangan masa depan yang hampir dapat dipastikan akan jauh lebih berat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bekasi bertindak tidak sekedar secara reaktif atas berbagai persoalan yang timbul akan tetapi mampu bertindak secara proaktif dan antisipatif.

Khusus mengenai penghitungan angka capaian Indikator Makro Lahan Irigasi teknis akan mengalami perubahan berdasarkan hasil pendataan dan untuk Indikator Makro Tingkat Penegakan Hukum akan dilakukan penelitian mengenai Indikator Kerawanan Sosial.

Renstra Kabupaten Bekasi 2005-2009 dapat menjadi acuan, sumber nilai dan inspirasi serta pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah sehingga akan terhindar dari kemungkinan menjauh dari Visi Misi yang diwujudkan, akan tetapi dengan Renstra akan mampu mempercepat pencapaian Visi Misi. Selain itu implementasi Renstra dalam meningkatkan kinerja pemerintahan menuju terbangunnya *good governance* akan sangat ditentukan oleh sinergi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, Renstra

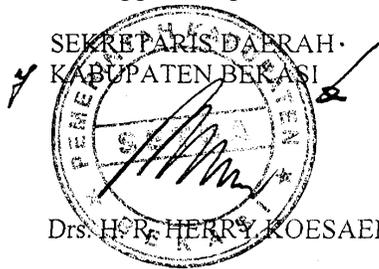
memberikan kontribusi bagi upaya untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati secara lebih merata dan lebih adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI,

t.t.d

Drs. H.M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 9 Agustus 2004



Drs. HERRY KOESAERI S., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI D